

BAB IV

BENCANA: DARI PERISTIWA ALAM KE ISU KEBIJAKAN DAN ISU ELEKTORAL

Pada bab ini menjelaskan mengenai peristiwa bencana alam mengalami pergeseran menjadi peristiwa isu kebijakan dan isu elektoral, selain itu juga membahas bagaimana isu-isu krusial yang muncul selama proses penanganan termasuk membahas bagaimana isu bencana digunakan oleh kandidat pada saat kampanye pada Pilkada Lombok Utara. Adapun data yang diperoleh merupakan hasil dari teknik pengumpulan data pada metode penelitian bab sebelumnya. Penanganan bencana memiliki hubungan dengan proses kontestasi politik dalam konteks bencana di Lombok Utara, terkait dengan bagaimana tumbangnya petahana dengan isu-isu dalam penanganan bencana.

4.1 Konteks Bencana dan Penanganan Gempa Bumi di Lombok Utara.

Pemerintah KLU, menetapkan status tanggap darurat pasca gempa bumi yang terjadi 5 Agustus, penetapan ini diambil oleh pemerintah daerah menyusul terjadinya gempa bumi yang melanda wilayah KLU. Bupati Najmul Akhyar menyampaikan hasil analisis valid BMKG supaya masyarakat tenang dan waspada dan selalu membangun komunikasi. Pemerintah telah melakukan verifikasi terkait dengan jumlah kerugian dan kerusakan akibat bencana gempa, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan data yang valid kepada pemerintah pusat sehingga dapat dengan segera ditindaklanjuti. Pendataan masa pemulihan tertuang dalam dokumen rehab/rekon dengan melibatkan berbagai pihak (Dokumen Rehab/Rekon pada tahun *2018 dan tahun 2019*).

Berbagai elemen terlibat dalam membantu masyarakat korban bencana, baik itu lembaga, kelompok, dan perseorangan terjun langsung memberikan bantuan kepada para penyintas. Tingginya rasa persaudaraan masyarakat terhadap saudaranya mereka yang tertimpa bencana memberikan dukungan berdampak pada terbangunnya semangat dan psikologis masyarakat untuk kembali membangun kehidupan yang lebih baik. Munculnya berbagai hambatan dan persolalan lapangan pada masa transisi awal peralihan membawa dampak kepada distribusi bantuan menjadi terhambat, terkesan penanganan bencana tidak berjalan. Kepanikan masyarakat karena situasi dan kondisi serba sulit ditambah dengan terbatasnya akses informasi dan akses bantuan ditambah dengan terjadinya penjarahan dan kekerasan ditengah jalan karena berebut akan bantuan semakin menambah lemahnya tata kelola penanganan bencana (Rahman dkk. 2023).

Tujuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi guna memperbaiki kondisi fisik maupun bangunan pasca bencana untuk menormalisasi kehidupan masyarakat. Semua perbaikan dan pendataan dilakukan dengan cara estapet guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat korban bencana. Meskipun dalam kondisi darurat pelayanan tidak boleh berhenti karena akan dapat berisiko pada kematian. Pelayanan tetap mengedepankan nilai-nilai pemberdayaan kepada masyarakat. Pembangunan fisik perumahan masyarakat diharapkan akan berdampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat hidup kembali pasca bencana. Kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak termasuk masyarakat akan menjadi kekuatan ditengah krisis menghantui. Menurut penuturan masyarakat, hampir semua kebutuhan makanan dan minuman dan sebagainya di pasok dari luar dan keluarga yang berada di wilayah lain, meskipun mereka juga terdampak dari

aktivitas gempa dengan paparan yang lebih sedang tetap bahu membahu saudara mereka yang ada di Lombok Utara (Dokumen Rehab/Rekon pada tahun 2018 dan tahun 2019).

Bencana gempa yang terjadi di pulau lombok, mengentak hati para warga masyarakat dari berbagai belahan dunia untuk turut membantu penanganan bencana baik secara langsung maupun melalui bantuan-bantuan yang disediakan pada kanal resmi pemerintah maupun pihak eksternal. Kepedulian tersebut sangat membantu masyarakat korban gempa tetapi harus di kelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan baru ditengah krisis yang melanda masyarakat dan bisa mengancam kenyamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi pemulihan. Tidak dapat kita pungkiri jika situasi krisis masih ditemukan banyak oknum yang mengambil kesempatan dari situasi bencana untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tentunya dapat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan masa pemulihan. Oleh karena itu, pola yang dilakukan adalah semua bantuan harus dikoordinasikan melalui BPBD Lombok Utara (Rahman dkk,2023).

Masa pemulihan bencana yang tertuang pada policy rehab/rekon di Lombok Utara dilakukan dengan mengali dan mengumpul berbagai potensi sumber anggaran untuk pendanaan baik itu APBN, APBD Provinsi NTB, DIPA dari berbagai Kementerian terkait termasuk bantuan donor pihak atau lembaga asing yang memberikan bantuan.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempermudah perencanaan pemulihan multidimensi yang bersifat berkelanjutan dengan mengacu pada prinsip membangun kembali dengan lebih baik. Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi

dilakukan dengan tujuan membangun kembali infrastruktur yang berbasis ketahanan (*Resilience*), dengan mengintegrasikan dengan kearifan lokal yang ada. Normalisasi fungsi pelayanan publik dan pemerintahan merupakan salah satu skala prioritas pasca terjadinya bencana, dengan normalnya kembali fungsi pelayanan tentunya berdampak terhadap percepatan masa pemulihan. selain itu juga, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat guna menopang pemulihan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Tahapan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan kembali daerah pasca bencana harus dilakukan dengan kolaborasi sumber anggaran pemerintah pusat maupun daerah, dan juga sumber anggaran dari dunia usaha dan sumber anggaran pihak lainnya yang secara resmi diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian kerusakan akibat bencana di Lombok Utara dilakukan dengan metode sektoral yaitu kajian metodologi survei yang dilakukan oleh tim, yang kemudian hasil tersebut dilakukan pembahasan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dari hasil kajian tersebut diselaraskan dengan kebijakan yang ada di setiap tingkatan baik itu pusat sampai pada level terbawah yaitu pemerintah desa punya andil dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Pemerintah menghimpun bantuan dari berbagai pihak sebagai bentuk keseriusan untuk membantu masa pemulihan kembali pasca bencana.

Transisi masa pemulihan pasca bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang mengalami bencana semata, namun harus menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, sektor swasta termasuk juga masyarakat. Besarnya anggaran masa

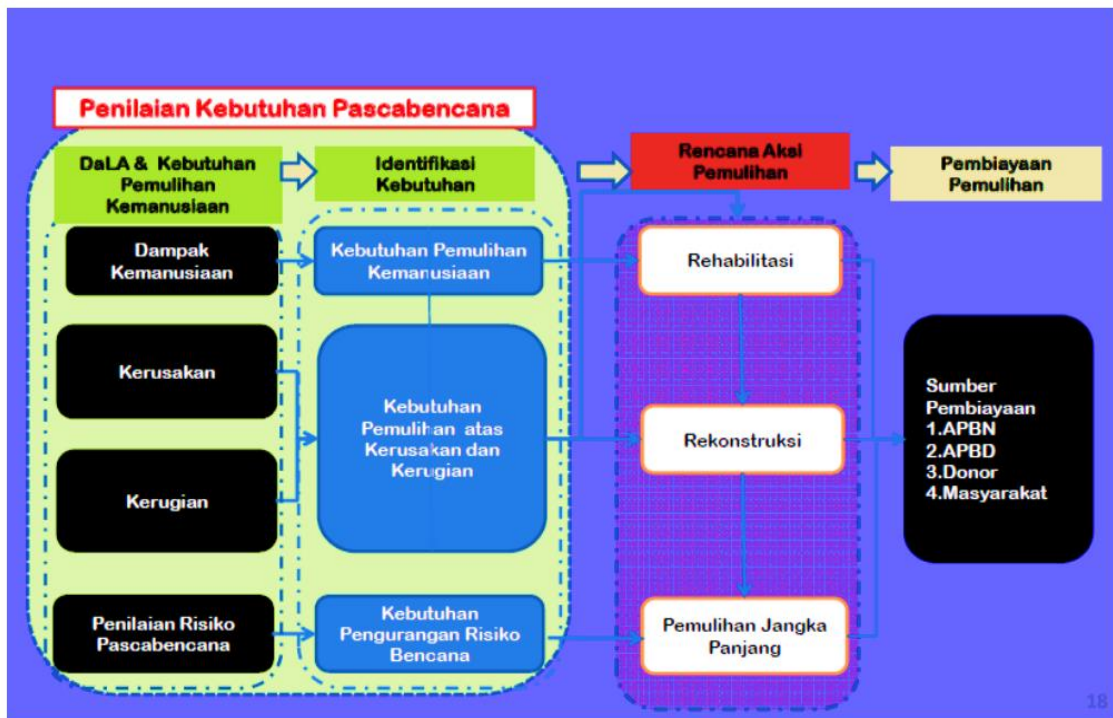
pemulihan tentunya tidak dapat dibebankan pada satu pihak, namun harus bergandengan tangan satu sama lain untuk saling membantu. Semua pihak yang terlibat harus menyadari bahwa masa transisi menjadi momentum untuk terus berinovasi meskipun dalam kondisi krisis.

Kebijakan rehabilitasi kembali dengan berbagai instrumen yang dilakukan akan berdampak pada kondisi sosial publik. Penilaian kebutuhan masa transisi yang tertuang dalam rehab/rekon dilakukan dengan berbagai pertimbangan akademik dan melibatkan berbagai unsur, ini dilakukan dengan harapan mendapatkan formulasi kebijakan yang betul-betul sesuai dengan apa yang dialami oleh publik. Kolaborasi dengan berbagai pihak akan mempermudah pemerintah dalam melakukan koordinasi kebutuhan serta menambah sumber daya pendukung dalam melakukan masa transisi.

Kebutuhan akan makanan dan berbagai bahan pokok lainnya tidak akan mampu disediakan oleh pemerintah daerah secara cepat ditengah situasi yang serba terbatas, oleh karena itu, dengan keterlibatan pihak non pemerintah dalam upaya penanganan akan memberikan kemudahan bagi pemerintah. Proses penilaian kebutuhan pasca bencana sampai pada penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca sebagaimana terdapat pada Gambar berikut ini:

Gambar.4.1

Proses Penilaian Kebutuhan Pasca bencana dan Penyusunan Rencana Aksi



Sumber: Dokumen, Rehabilitasi, Rekonstruksi, 2019.

Perhitungan kebutuhan masa pemulihan yang didapatkan dari hasil kajian jumlah kerusakan dan kerugian yang ditemukan dilapangan yang nantinya akan menjadi dasar untuk menghitung akan kebutuhan masa pemulihan. oleh karena itu, tahapan masa pendataan harus benar-benar dilakukan tanpa celah sedikitpun kesalahan, jika itu terjadi maka akan berdampak pada distribusi bantuan yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Penilaian kerusakan dan kerugian yang baik akan berdampak pada kebijakan yang tepat dan sebaliknya jika proses pendataan bermasalah sudah barang tentu kebijakapun akan bermasalah. Penilaian kebutuhan pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pasca bencana, mulai dari kebutuhan kemanusiaan, kerusakan, kerugian, dan penilaian risiko pasca bencana, hal ini

tertuang dalam beberapa pokok pikiran yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, di antaranya:

1. Terhadap pembangunan perumahan warga masyarakat menginginkan pembangunan yang dilakukan secara cepat karena mereka tinggal dikamp pengungsian yang berdampak terhadap kondisi kesehatan mereka, selain itu pembangunan kembali menekankan pada kebersihan lingkungan.
2. Percepatan pembangunan kembali pasca bencana gempa tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015, bagi daerah-daerah yang mengalami paparan akibat bencana gempa lombok 2018. Melalui kebijakan pemerintah memberikan dana stimulan pembangunan kembali perumahan warga masyarakat dengan besaran berdasarkan pada tingkat kerusakan dengan berdepoman pada klaster, dengan kerusakan tingkat berat, tingkat sedang, dan kerusakan tingkat ringan, dengan besaran bantuan berbeda, dari 10 juta sampai 500 juta per- satu rumah.
3. Spesifikasi bangunan perumahan bagi masyarakat korban gempa harus sesuai dengan persyaratan yang menjadi ketentuan pembangunan berdasarkan konstruksi rumah tahan gempa.
4. Guna menjaga keselamatan warga masyarakat pemerintah melalui PVMBG menghimbau kepada warga masyarakat yang tinggal berada pada kawasan rawan akan potensi untuk dilakukan relokasi ke tempat yang lebih aman.
5. Pemerintah memfokuskan untuk masa pemulihan pada pembangunan kembali sektor permukiman fasilitas umum seperti: kesehatan, pelayanan kependudukan dan fasilitas pendidikan.

6. Pemerintah dengan berbagai upaya mempercepat masa pemulihan kehidupan masyarakat dengan bekerjasama dengan lintas Kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selain itu, juga mengakomodir bantuan dari pihak eksternal seperti: pihak luar negeri, masyarakat sipil yang memberikan donasi.
7. Diperkukan manajemen risiko guna mencegah dampak negatif yang lebih parah.

Pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan bencana yang melanda daerah Lombok Utara dan mendapatkan respons secara positif melalui langkah-langkah konkrit rehabilitasi dan rekonstruksi dalam menjawab persoalan dan tantangan pembangunan kembali permukiman warga korban bencana. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya masa transisi pemulihan diantaranya:

1. Kebijakan masa pemulihan dapat digunakan sebagai arena membangun kembali jiwa dan fisik warga masyarakat termasuk juga membangun komunitas peduli bencana.
2. Dibutuhkan system tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebutuhan melalui koordinasi intensif serta berdasarkan pada keinginan publik yang menjadi penyintas akibat bencana gempa bumi.
3. Pembangunan kembali pada masa pemulihan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan partisipasi publik dan kondisi daerah setempat dan juga memberikan edukasi pada masyarakat akan pentingnya pengurangan risiko bencana.

4. Pembangunan permukiman harus menggunakan standar konstruksi yang sesuai dengan prinsip rumah tahan gempa guna menjadi keamanan dan kenyamanan.
5. System pembangunan mendepankan pada keterbukaan sehingga dapat diakses oleh semua pihak.
6. Penyaluran dana stimulan harus dapat di pertanggungkan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: system perencanaan efisien, efektif, yang bertanggung jawab.
7. Pembentukan tim teknis yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk memberikam pedampingan intensif kepada kelompok masyarakat
8. Melakukan komunikasi yang efektif dengan berbagai sektoral guna mempermudah akses koordinasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemulihan
9. Kebijakan pemulihann harus mempertimbangkan dampak kerusakan dan ketersediaan anggaran, serta dapat dilakukan pengkajian dan evaluasi kembali jika diperlukan.
10. Usulan kepada pemerintah pusat untuk pencairan dana stimulan ;
11. Minimnya anggaran yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah berdampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah.
12. Guna menjaga kemanan dan kenyamanan diperlukan Penetapan relokasi bagi wilayah-wilayah yang memiliki potensi kerentanana dengan tetap berpedoman pada tata ruang.

13. Upaya optimalisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Bupati yang kemudian di distribusikan kepada instansi secara berjenjang.

Sumber pendanaan masa pemulihan dari pemerintah pusat melalui anggaran pembelajaran negara melalui Kementerian yang terkait, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten serta berbagai sumber lainnya non pemerintah. Pembangunan kembali daerah yang terdampak bencana tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, namun harus secara kolektif dengan melihat batasan kewenangan masing-masing pihak. Melalui kebijakan rehabilitasi diharapkan akan mampu melahirkan semua skema dan strategi jitu untuk menjawab keterbatasan anggaran masa pemulihan. Kolaboratif governance terlihat jelas pada masa pemulihan di Lombok Utara dengan berbagai pihak ikut terlibat dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan kembali.

Dalam melakukan perencanaan dan pendanaan dilakukan secara sistematis dan terukur melalui koordinasi dengan pemerintah di atasnya baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi. Tujuan penyusunan skema pendanaan masa pemulihan dilakukan untuk percepatan pembangunan sektor infrastruktur publik maupun sektor perumahan masyarakat. Meskipun dalam situasi krisis efektivitas dan akuntabilitas tata kelola keuangan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan masa pemulihan. Besaran perencanaan anggaran pembangunan kembali daerah pasca bencana tersaji pada gambar berikut:

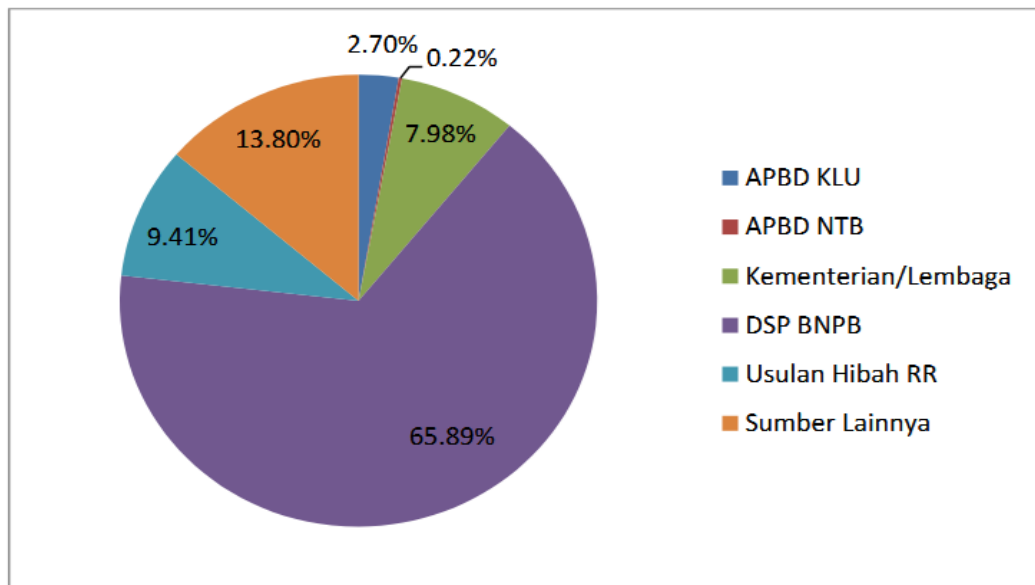
Tabel 4.1
Indikasi Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

NO	SEKTOR	Nilai Kebutuhan	Pembiayaan (Rp) 2018 - 2019					
			APBD Lombok Utara	APBD Provinsi NTB	Kementerian/Lembaga	DSP BNPB	Usulan HIBAH RR	Sumber Lainnya
1	Permukiman	3,182,787,143,000	49,371,350,000	-	157,995,000,000	2,819,170,793,000	156,250,000,000	-
2	Infrastruktur	471,556,296,279	88,351,173,457	7,461,000,000	263,772,442,000	-	109,185,180,821	2,786,500,000
3	Sosial	1,056,558,750,000	22,661,610,000	2,707,766,000	35,888,169,515	38,810,388,227	174,808,336,485	781,682,479,773
4	Ekonomi	499,525,111,400	17,564,311,400	650,000,000	24,551,500,000	-	52,101,800,000	404,657,500,000
5	Lintas Sektor	389,195,154,943	14,821,752,921	8,540,549,590	47,462,696,858	-	318,370,155,575	-
TOTAL		5,599,622,455,621	192,770,197,778	19,359,315,590	529,669,808,373	2,857,981,181,227	810,715,472,881	1,189,126,479,773

Sumber: *Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kab. Lombok Utara Tahun 2018-2019*

Gambar. 4.2

Persentase Pembiayaan Rehab/Rekon



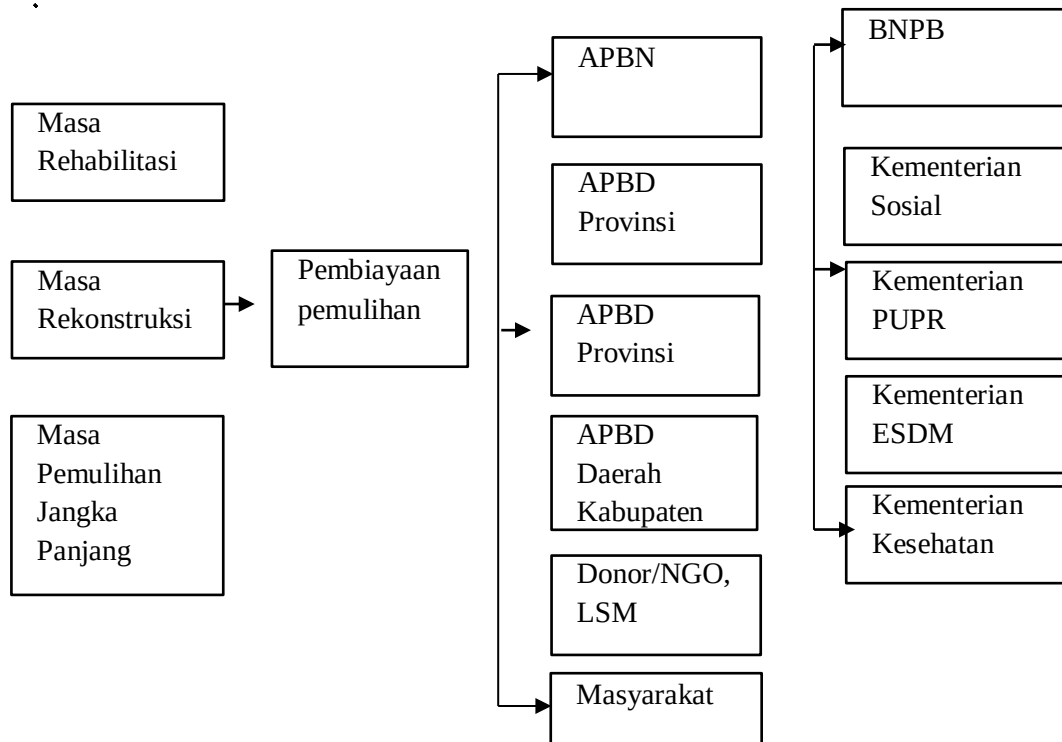
Sumber: Dokumen Rehab/Rekons, 2018

Data diatas menunjukkan bahwa perencanaan pembiyaan pembangunan kembali daerah yang dilanda bencana, masih terpusat pada pemerintah pusat melalui DSP BNPB Republik Indonesia dengan angka mencapai 51,04% untuk sektor perumahan. Sedangkan untuk sumber pendanaan lainnya melalui sektor eksternal termasuk dunia usaha mencapai 21,24%, dan untuk APBN kementerian/lembaga lainnya sebesar 9,46%. Jika mengacu pada sumber pendanaan tersebut pemerintah masih kekurangan dana yang cukup signifikan terhadap pembangunan fisik perumahan warga.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, sesungguhnya sudah melakukan apa yang diinstruksikan oleh pmerintah pusat melalui kewenangan daerah terhadap penanganan yang ada di daerah. Adanya kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan akibat bencana yang dashyat. Skema pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan bencana berasal dari anggaran pemerintah pusat melalui berbagai kementerian, termasuk juga APBD pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sendiri. Masa pemulihan benar-benar dilakukan dengan swadaya sambil menunggu bantuan dari pemerintah yang terkendala banyak aturan teknis dan prosedur lainnya. Dalam situasi darurat diperlukan koordinasi yang utuh untuk mendistribusikan bantuan dari berbagai pihak. Skema perencanaan untuk pendanaan tersebut dapat disederhanakan ke dalam struktur anggaran penanganan pasca bencana Kabupaten Lombok Utara seperti terlihat pada Gambar berikut,

Gambar 4.3

Struktur Anggaran Penanganan Kabupaten Lombok Utara Tahun, 2018



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025.

Struktur anggaran penanganan pasca bencana di Lombok Utara mencakup berbagai komponen yang saling terkait untuk memastikan respons yang efektif dan efisien terhadap kondisi lapangan. Dengan alokasi yang tepat, pemerintah dan organisasi dapat lebih baik mempersiapkan diri, merespons, dan memulihkan diri dari, serta mengurangi risiko di masa depan. Anggaran penanganan sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam melakukan masa rehabilitasi terutama terkait dengan pembangunan fisik RTG (Rumah Tahan Gempa). Dengan adanya anggaran masa pemulihan yang bersumber dari berbagai pihak diharapkan akan mampu mempermudah dan mengakselerasi masa pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak.

Hal ini sesuai dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada salah satu media (<https://setkab.go.id>):

“Pemerintah telah mencairkan anggaran untuk penanganan gempa bumi di Lombok sebesar 985,8. Pemerintah berkomitmen untuk membangun kembali pasca terjadinya bencana melalui kebijakan pemulihan (Rehab/Rekon). Hal ini dilakukan untuk menopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat kembali supaya bangkit lebih awal. Pemberian bantuan kepada masyarakat dilakukan secara bertahap yaitu 50 juta setiap rumah dan akan diikuti dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah melalui BNPB dengan melakukan proses verifikasi berjenjang dengan harapan semua akan dapat terbangun kembali sesuai dengan harapan masyarakat di daerah.

Pernyataan Kepala pelaksana BPBD Lombok Utara, Bapak Muhadi, pada saat menggelar Konferensi Pers terkait dengan progres masa rehabi/rekon pasca gempa di Lombok Utara, Maret tahun 2019, pada media <https://www.antaraneews.com>

“ Bahwa untuk proses pencairan bantuan pembangunan kembali rumah warga yang rusak, BPBD Kabupaten Lombok Utara, telah menerima dana siap pakai untuk stimulan rumah rusak akibat gempa bumi pada 2018 sebesar Rp2,07 triliun hingga Maret 2019. Dimana Dana bantuan stimulan tersebut masuk ke rekening BPBD dan ditransfer secara langsung kepada rekening masyarakat yang terdampak”.

Komitmen pemerintah dalam membangun kembali daerah terlihat dari bagaimana respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat secara aktif melalui telah dicairkan anggaran untuk penanganan gempa sebesar Rp.985,5 M pada tahap awal. Pencairan anggaran stimulan diberikan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun kembali daerah lombok utara guna menunjang kondisi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat meskipun dalam situasi pemulihan.

Distribusi bantuan penanganan korban gempa dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) disalurkan melalui beberapa kementerian yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur di dalam peraturan kementerian masing-masing. Beberapa kementerian sebagai pelaksana anggaran penanganan di antaranya yaitu: Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian ESDM, dan Kementerian Badan Nasional penanggulangan Nasional. Berikut dapat dilihat kementerian penyalur dana bantuan penanganan bencana di pulau lombok tahun 2018:

Tabel. 4.2

Kementerian Penyalur Dana Bantuan Penanganan Gempa Bumi
Pulau Lombok, Tahun 2018.

No	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Tujuan
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).	Rp. 176,2 M	Membantu menyediakan kebutuhan secara darurat diantaranya: Tenda hunian sementara, mobil sanitasi, kendaraan tangki pengangkut air serta peralatan penerangan genset, dan kebutuhan lainnya.
2	Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos)	Rp. 12,6 M	Penyediaan bantuan kebutuhan logistik berupa: sembako, sandang, papan, pangan, tenda sementara, serta pendirian dapur umum di semua wilayah terdampak.
3	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes)	Rp. 7,8 M	Keperluan kebutuhan logistik kesehatan, seperti: kelengkapan obat-obatan, gizi, pos kesehatan, peralatan persalinan, kebutuhan kesehatan lingkungan serta alat-alat pendukung lainnya.
4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Rp. 1,5 M	Anggaran dari kementerian ESDM tersebut diberikam untuk membangun tempat persediaan air bersih seperti Sumur Bor dan kebutuhan lainnya.

5	Badan Nasional Penanggulangan (BNPB)	Rp. 557,7 M	Anggaran tersebut diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan yang mendasar guna menunjang proses percepatan pemulihan.
---	--------------------------------------	-------------	--

Sumber: <https://kumparan.com> diakses, pada 12/11/2025.

Bantuan dana stimulan pembangunan perumahan tahan gempa yang bersumber dari pemerintah pusat melalui proses verifikasi yang cukup panjang, karena alur birokrasi yang dilalui melalui 5 Kementerian memakan waktu. Bantuan yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat misalnya Kemenerian PUPR focus pada kebutuhan mendesak seperti akan kebutuhan air dan kebutuha lainnya. Sedangkan BNPB sendiri berfokus pada pemenuhan kebutuhan perumahan yang akan dibangun berdasarkan jenis kerusakan rumah warga yang terdampak. Sedangkan pemerintah daerah sendiri jumlah anggaran yang tersedia untuk penanganan bencana di Provinsi NTB sangat terbatas. Sebagai daerah yang terdampak paling parah akibat dari gempa bumi tersebut, Pemerintah Daerah KLU, mencapai kerugian paling besar yaitu Rp. 9,999,185,255.451 hampir setengah dari kebutuhan penanganan bencana di Provinsi NTB.

Dalam pertarungan politik kandidat pada situasi krisis menjadikan struktur anggaran penanganan anggaran memiliki pengaruh yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan kandidat. Setidaknya ada 2 (dua) analisis yang dapat dimunculkan pada penelitian ini: *Pertama*, anggaran untuk proses masa pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan ada tetapi tidak digunakan secara maksimal oleh kandidat ataupun mengalami kendala dalam proses distribusi kepada masyarakat, sehingga kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap

kepercayaan publik kepada pemerintah. *Kedua*, jika anggaran untuk penanganan kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi korban, maka dari awal petahana sudah ditafsirkan kalah. Pada posisi politik seperti itu tentunya sangat menguntungkan bagi pasangan calon penantang dalam hal ini JODA (Djohan-Dany) untuk terus membangun isu penanganan bencana yang belum maksimal sebagai isu utama untuk menyerang kandidat petahana pada saat melakukan kampanye. Penilaian kinerja pemerintah/petahana oleh publik yang dianggap belum maksimal menjadi senjata yang jitu untuk digunakan sebagai media meyakinkan masyarakat.

Dalam memberikan respons terhadap situasi darurat pemerintah sudah memberikan tanggapan dengan aksi cepat tanggap darurat penanganan warga dan terdampak. Pemerintah daerah menghimbau kepada warga masyarakat untuk berperan aktif sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki untuk menangani situasi siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan rasa trauma dan kepanikan masyarakat. (Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah Lombok Utara, 2021:221).

Wujud dari kepedulian dan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan bencana terlihat ketika Bupati Lombok Utara mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 64/885/Bupati/2018, tanggal 30 Juli 2018. Sebagai respons terhadap terjadinya bencana gempa bumi di Lombok Timur, dan berdampak terhadap kec. Bayan Lombok Utara. Salah satu isu dari surat edaran tersebut Adalah Pemerintah Daerah Lombok Utara menetapkan status bencana gempa bumi sebagai tanggap darurat selama 7 hari, mulai tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus. Selain itu, pemerintah daerah KLU, terus melakukan monitor, identifikasi,

dan evaluasi serta tindak lanjut Solusi lapangan terhadap dampak peristiwa gempa bumi.

Dalam rangka merespons situasi pasca terjadinya gempa bumi 2018, Bupati Lombok Utara, Dr. Najmul Akhyar, mengeluarkan Surat Himbauan Nomor: 64/1256/BUPATI/2018, sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan Inpres nomor 5 tahun 2018 dan petunjuk pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat, beberapa himbauan tersebut yaitu:

1. Kepada warga yang terdampak gempa bumi untuk berkoordinasi dengan kepala dusun masing-masing, terkait dengan kebijakan stimulan bangunan rumah dengan mempersilahkan warga memiliki jenis/model rumah yang diinginkan yaitu jenis/model: Risha, Riko, atau Rika;
2. Kepada warga terdampak gempa bumi, agar secepatnya membentuk kelompok masyarakat dan berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat sebagai syarat dalam Pencairan Bantuan Stimulan perbaikan pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi;
3. Bagi kelompok masyarakat yang telah terbentuk, agar ketua kelompok berkoordinasi dengan penyedia dan fasilitator pendamping perbaikan/Pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi;
4. Dinas/Badan/Kantor yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi memudahkan proses akselerasi lancarnya perbaikan/Pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi.

Upaya dalam mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang dialami warga dan korban serta melakukan inventarisasi jumlah korban, jumlah keluarga dan jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Segenap potensi sumber daya yang ada masif dimobilisasi agar dapat berjibaku dan bertugas menangani keadaan siaga darurat, tanggap darurat, transisi ke pemulihan, dan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan korban, termasuk menyediakan kebutuhan dan menentukan lokasi pengungsian di Lombok Utara mulai dari kebutuhan dasar dan pemulihan psikologis korban dan warga. (*Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah Lombok Utara, 2021:221*).

Pemerintah daerah melalui OPD masing-masing menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan transisi masa pemulihan, BPBD terus melakukan proses penyelamatan dan pendataan terkait dengan jumlah korban serta kerugian yang diakibatkan oleh yang terjadi, meskipun dengan sumber daya yang ada tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Termasuk juga humas bertugas mengumpulkan informasi dari tempat kejadian dan mendampingi pimpinan daerah. Peran humas mencari gambaran umum peristiwa, mengumpulkan informasi dari dinas-dinas terkait, kemudian membuat review terkait dengan penanggulangan. Tim Humas berkoordinasi dengan sejumlah jurnalis baik media cetak maupun elektronik. Semua informasi yang dikumpulkan Tim Humas tersebut lantas dilansir di media sosial resmi milik Humas Pemkab. Lombok Utara. Kendala yang dihadapi di Lombok Utara saat gempa terjadi Adalah lumpuhnya infrastruktur. Jaringan Listrik mati, saluran air terputus, sarana komunikasi terputus, dan sejumlah jalan tidak bisa diakses. Keberadaan media sosial yang dimiliki oleh Humas Pemkab. Lombok Utara

menjadi sarana untuk mengeluhkan kondisi yang dihadapi para korban bencana (Nurjanah dkk. 2021).

Secara kuantitas bahwa SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Lombok Utara belum memadai untuk proses menyokong masa. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam membantu masa pemulihan pasca bencana. Pada tahap awal pemerintah daerah melakukan pembongkaran dan pembersihan bangunan yang mengalami kerusakan seperti: perumahan warga, fasilitas perkantoran, pasar, tempat ibadah, pertokoan, fasilitas layanan dasar serta Pembangunan hunian sementara masyarakat korban alam gempa bumi 2018.

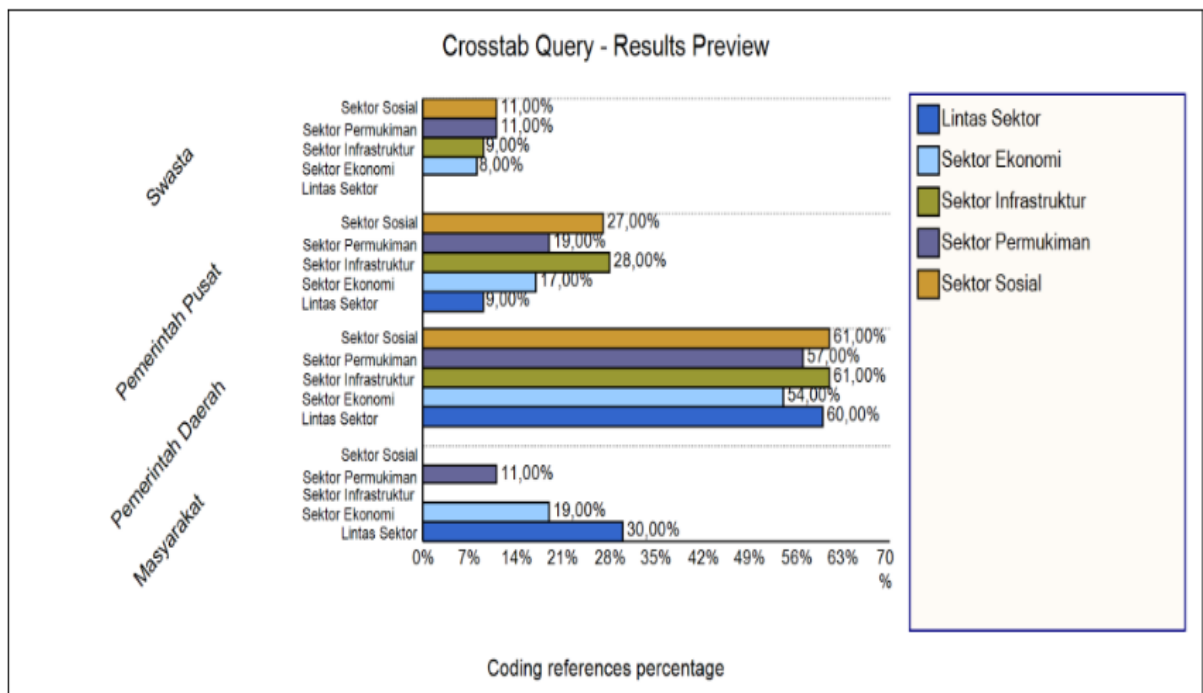
Keterbatasan sumber daya dalam proses pemulihan pasca bencana tentunya merupakan pekerjaan berat pemerintah daerah, sehingga sangat diperlukan keterlibatan pihak-pihak non pemerintah dalam proses pemulihan sangat diperlukan guna mempercepat proses pemulihan. Kerja sama dalam tata kelola pemerintahan adalah salah satu cara guna membantu masyarakat untuk pulih dari keadaan sulit. Menurut Basher (2008), karakteristik yang perlu diperhatikan dalam penanganan bencana adalah sifat multi sektor dan multi level dari tugas untuk benar-benar mengimplementasikan pengurangan. Semua sektor terdampak oleh risiko, dan semuanya dapat berkontribusi pada pengurangan risiko-atau, tanpa disadari, pada peningkatan risiko yang tidak disengaja. Ini berarti bahwa tanggung jawab untuk pengurangan risiko tidak dapat dibebankan kepada satu sektor atau satu kementerian saja, tetapi harus diimplementasikan secara sistematis di semua sektor.

Kesiapan dalam menghadapi bencana yang belum maksimal merupakan salah satu kendala nyata yang ditemukan di lapangan ketika proses masa rehabilitasi

dan rekonstruksi akibat terjangkit bencana di pulau lombok tidak berada di satu titik, namun di beberapa lokasi mengakibatkan terpecahnya konsentrasi pemerintah dengan keterbatasan sumber daya sehingga berdampak terhadap penanganan bencana (BNPB dan USAID, 2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam penanganan pasca bencana tentunya menjadi salah satu hambatan yang bersifat fundamental dalam mendukung proses percepatan masa pemulihan. misalnya, keterbatasan tenaga ahli dan aplikator teknis, birokrasi lokal serta SDM pelayanan dasar. Kondisi tersebut tentunya, harus dilakukan dengan melakukan kolaborasi semua pihak dalam proses pemulihan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Gambar 4.4

Keterlibatan Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Proses Pemulihan Pasca
Bencana di Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2018.



Sumber: Bakti dan Nurmandi, (2020).

Keterlibatan dari berbagai pihak untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana sangat dibutuhkan, dan dapat dilihat dari gambar di atas pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dibandingkan pihak pemerintah atau non pemerintah. Pemerintah daerah tentunya tidak mungkin mampu untuk merespons berbagai aspek dalam upaya dan pemulihan secara mandiri, selain lembaga pemerintah sendiri lembaga non pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Utara.

Pemulihan pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Utara bersama BPBD dikoordinasikan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD tersebut. Peraturan tentang penanggulangan memang mengamanatkan pemerintah sebagai penyelenggara utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemulihan pasca akan tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki perlu didorong peran dari berbagai pihak dalam membantu pemulihan pasca bencana. Berbagai kerja sama pemerintah maupun lembaga non pemerintah/ swasta telah dilakukan sebagai upaya untuk pemulihan kembali kondisi masyarakat seperti sebelum terjadinya. Meskipun adanya dukungan dari pihak non pemerintah tentu pemerintah daerah harus mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap proses pemulihan, berikut grafik dari kegiatan pemulihan pasca bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah (Bakti dan Nurmandi.2020).

Dalam masa penataan (rehabilitasi dan rekonstruksi), upaya yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah serta didukung pihak lain terkait dengan penanganan gempa bumi 2018, sudah bisa dirasakan masyarakat. Kebijakan penataan diambil guna mengakselerasi normalisasi keadaan yang dialami warga

terdampak dengan memberikan bantuan pemulihan sosial dan pemulihan infrastruktur bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, terdapat langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk penanganan korban dan warga terdampak gempa bumi 2018. Pertama, Pembangunan rumah, data Kementerian Sosial total rumah rusak sebanyak 71.937 unit, rumah rusak tersebut telah di bangun oleh BNPB berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia.

Adapun bantuan Pembangunan kembali rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi 2018 sebagai berikut: (1) Pembagian dengan kerusakan ringan di berikan dana stimulan senilai Rp. 10 juta/unit, (2) Kategori yang masuk pada kriteria kerusakan sedang senilai Rp. 25 juta/unit, dan (3) Kluster yang paling tinggi yaitu dengan kerusakan berat senilai Rp. 50 juta/unit. Sedangkan kerusakan pada fasilitas pelayanan dasar/umum (Sarana Sekolah, Rumah Sakit, Masjid, Musholla, Pura, Vihara serta fasilitas sosial dan ketiga, infrastruktur pemerintahan, keempat, sarana transportasi, bantuan dari berbagai pihak dikelola satu pintu: pencatatan dan distribusi. Sementara itu dilaksanakan pengaktifan klaster pengungsian dan perlindungan yang melibatkan seluruh NGO lokal dan nasional (*Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah Lombok Utara, 2021*).

4.2 Dari Bencana Alam Ke Isu Kebijakan: Isu Krusial Penanganan dan Pembangunan di Lombok Utara.

Terdapat delapan (8) Isu krusial yang muncul dalam proses penanganan bencana yaitu, isu sektor pembangunan permukiman wargga masyarakat, infrastruktur, ekonomi produktif masyarakat, sosial masyarakat, kerusakan lintas

sektor, pembangunan fasilitas pendidikan dan rumah sakit serta isu kesejahteraan dan jaminan hidup masyarakat. Namun yang paling menonjol terkait dengan dua (2) isu krusial yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu, isu bantuan pembangunan permukiman warga masyarakat dan bantuan kesejahteraan masyarakat yang disebut dengan bantuan sosial jaminan hidup (JADUP).

4.3.1 Isu Sektor Permukiman Warga Masyarakat

Pemerintah Lombok Utara dalam situasi tanggap darurat mengambil langkah terus-menerus memonitor, mengidentifikasi, dan melakukan evaluasi untuk penanganan korban berdampak gempa. Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Lombok Utara jumlah warga terdampak sebanyak 6.237 jiwa dari 4.047 Kepala Keluarga. Berikut dapat dilihat tabel rekapitulasi kerusakan dan kerugian akibat pada 2018:

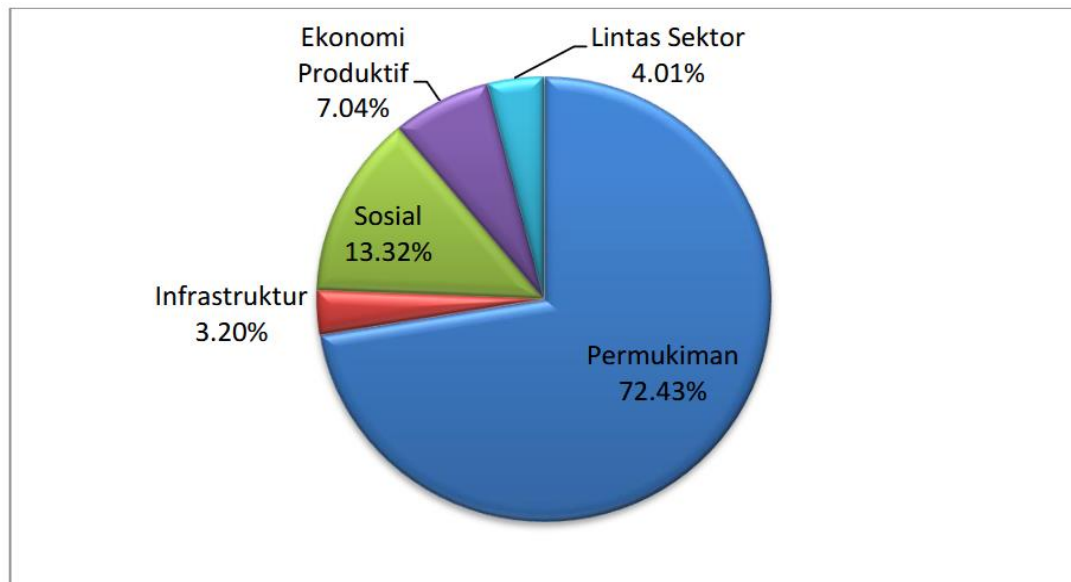
Tabel. 4.3
Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian

No	Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (RP)	Total dan Kerugian (Rp)
1	Pemukiman	3,505,485,200,000	3,731,409,800,000	7,236,895,000,000
2	Infrastruktur	303,676,794,062	15,943,406,000	319,620,200,062
3	Sosial	1,160,633,995,036	169,893,013,566	1,330,527,008,602
4	Ekonomi	274,310,973,839	428,718,820,000	703,029,793,839
5	Lintas Sektor	235,104,235,250	166,009,017,698	401,113,252,948
Total		5,479,211,198,187	4,511,974,057,264	9,991,185,255,451

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Rehab Rekonstruksi Pasca Gempa Lombok Utara, 2018.

Data kerusakan akibat gempa bumi pada tahun 2018 jika dipresentasikan sangat besar, seperti kerusakan sektor permukiman yang mencapai 72.43 persen atau kerusakan yang persentasenya paling parah. Sektor sosial dengan kerusakan mencapai persentase sebesar 13.32 persen, sektor ekonomi produktif mencapai 7.04 %, sektor infrastruktur mengalami kerusakan mencapai 3.20%, sedangkan 4.01 persen pada sektor lintas lainnya.

Gambar. 4.5 Diagram Kerusakan dan Kerugian



Sumber: (Dokumen Rehab/Rekon, 2018-2019).

Berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa jumlah rumah yang mengalami kerusakan cukup besar bila dibandingkan dengan kerusakan sektor infrastruktur lainnya. Kerusakan permukima yang mencapai 72,43% tentunya akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah yang cukup berat terutama pada masa darurat belum dicabut pemerintah pusat. Kondisi sosial masyarakat mengalami kerusakan cukup parah kedua dengan persentase kerusakan 13,32%, hal ini sangat berpengaruh terhadap komunikasi masyarakat dengan sekitar termasuk juga dengan

pihak luar menjadi sangat terbatas. Ekonomi produktif tidak luput dari dampak bencana yang begitu besar, dimana hilangnya sumber pencaharian masyarakat karena rusaknya berbagai fasilitas ekonomi dan bangunan yang mendukung sistem perdagangan dan ekonomi masyarakat. Lintas sektor dan infrastruktur lainnya juga terdampak oleh bencana gempa, dimana hampir semua bangunan pendukung tidak dapat beroperasi seperti biasa.

Tabel. 4.4

Jumlah Kerusakan Perumahan dan Jumlah yang Verifikasi

No	Tingkat Kerusakan	Jumlah Perkiraan (Unit)	Telah di Verifikasi Hingga 15 Oktober 2018 (Unit)
1	Kerusakan Berat	50,665	44.014
2	Kerusakan Sedang	9,500	1.758
3	Kerusakan Ringan	3,167	4.081
Total		63,332	49.853

Sumber: Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2018.

Berdasarkan data diatas memberikan gambaran bahwa jumlah kerusakan terkait dengan perumahan warga masyarakat cukup besar terutama pada kluster dengan tingkat kerusakan yang paling berat mencapai 50,665 yang kemudian tidak semua terverifikasi karena jumlah bantuan yang tersalurkan secara bertahap. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat bagi yang belum mendapatkan bantuan. Tingkat kerusakan sedang juga cukup banyak sebesar 9,500 yang teridentifikasi di semua wilayah yang ada di Lombok Utara, jumlah yang terverifikasi hanya sekitar 1,758 sangat jauh dari jumlah yang mengalami kerusakan, kondisi ini semakin menambah ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dalam mengelola bantuan perumahan. Sedangkan untuk kategori

kerusakan ringan hanya sekitar 3 ribu rumah dengan yang terverifikasi melebihi perkiraan tentunya hal ini akan berdampak terhadap proses pencairan dana stimulan.

Data di atas menunjukan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi pada tahun 2018 secara fisik dan finansial sangat begitu besar. Oleh karena itu proses Pembangunan kembali membutuhkan dana dan waktu yang memadai untuk masa pemulihan pasca bencana. Merujuk pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bahwa mengamanatkan pemerintah pusat termasuk juga daerah sebagai penyelenggara terdepan yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemulihan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21, menegaskan bahwa kewenangan melaksanakan masa sebelum dan sesudah darurat ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Bakti dan Nurmandi, 2020).

Besarnya Jumlah Kerusakan Perumahan akibat gempa bumi 2018, membuat pemerintah daerah harus melakukan perencanaan untuk sumber pendanaan perumahan warga yang terdampak, di dalam dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi sumber pendanaan sudah teralokasi berdasarkan kewenangan pada lintas kementerian. Data Kerusakan perumahan berdasarkan pada proses pendataan yang dilakukan oleh pendamping untuk verifikasi jenis kerusakan secara keseluruhan sebesar 63,332 dan telah terverifikasi sebanyak 49.853. Artinya masih ada data yang belum dilakukan untuk verifikasi oleh pemerintah yang jumlahnya cukup banyak berdampak terhadap kepuasan masyarakat.

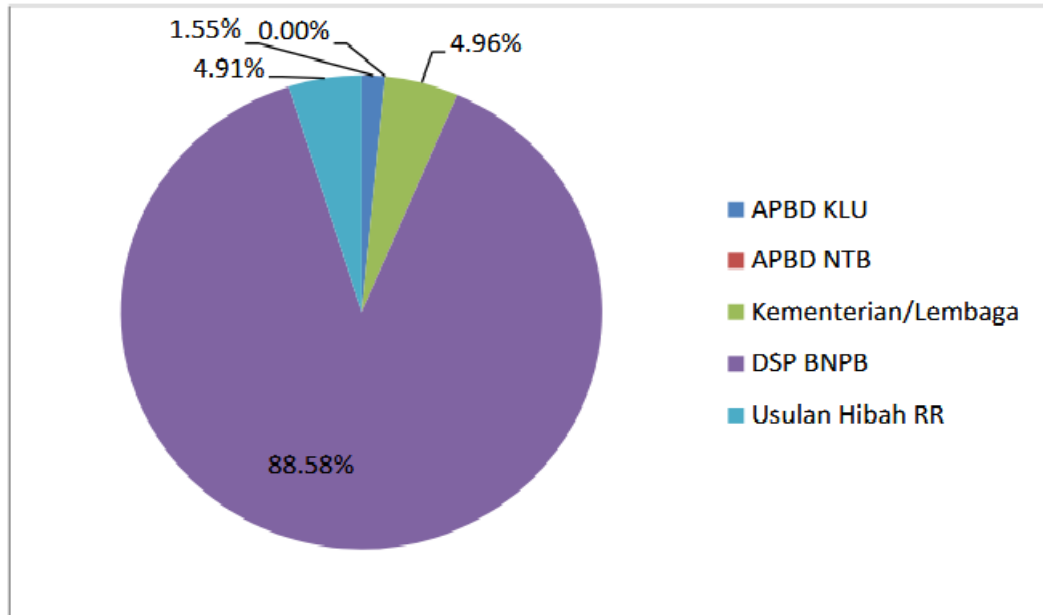
Tabel. 4.5
Indikasi Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Sektor Perumahan

NO	Subsektor	Pembiayaan (Rp) Tahun 2018-2019						
		Nilai Kebutuhan	APBD Lombok Utara	APBD Provinsi NTB	Kementerian/ Lembaga	DSP BNPB	Usulan HIBAH RR	Sumber Lainnya
1	Perumahan	2,996,887,143,000	19,721,350,000	-	157,995,000,000	2,819,170,793,000	-	-
2	Prasarana Lingkungan	185,900,000,000	29,650,000,000	-	-	-	156,250,000,000	-
Total		3,182,787,143,000	49,371,350,000	-	157,995,000,000	2,819,170,793,000	156,250,000,000	-

Sumber: (Dokumen Rehab/Rekon 2018-2019).

Data diatas menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Lombok Utara untuk sektor perumahan sangat besar yaitu: sub sektor perumahan dengan nilai 2,996,887,143,000 dan pada sub sektor prasarana lingkungan dengan nilai kebutuhan sebesar 185,900,000,000. Indikasi pembiayaan yang direncanakan bersumber dari berbagai pihak termasuk diantaranya, APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sendiri yang mencapai perhitungan sebesar 19,721,350,000 di sektor perumahan dan kementerian lembaga lain dengan kebutuhan kurang-lebih sebesar 157,995,000.

Gambar. 4.6
 Persentase Indikasi Pembiayaan Rehab/Rekon Pasca Bencana Pada Sektor Perumahan



Sumber: Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2018.

Proses untuk menyelesaikan rumah yang rusak akibat bencana yang berlangsung cukup lama, disebabkan oleh proses administrasi dalam pendataan yang mengalami anomali atau terjadinya perubahan data secara terus menerus. Kondisi ini tentunya akan berdampak terhadap proses penyelesaian RTG menjadi lebih lambat dari perkiraan dan perencanaan sebelumnya. Pendataan yang tidak tepat karena terjadinya perpindahan warga masyarakat serta minimnya kesadaran untuk membentuk kelompok merupakan hal yang menjadi faktor penghambat proses penyelesaian RTG di KLU. Pelibatan berbagai unsur termasuk pemerintah desa, Kecamatan, merupakan bagian kunci dalam memproses dan verifikasi informasi yang dibutuhkan secara mendasar oleh pihak pemerintah di atasnya. Penguasaan wilayah dan jumlah korban serta berbagai data yang dibutuhkan harus

dapat disediakan dengan baik dengan tujuan untuk mempermudah verifikasi lebih baik (Fanggidae, 2018).

Pelaksanaan Pilkada pada masa transisi dapat menjadikan sebagai arena kontestasi kekuasaan antar pasangan calon yang bertarung, kondisi peralihan sangat potensial untuk disalahgunakan oleh pasangan calon guna mendapatkan simpati publik. Tahapan mulai dari verifikasi faktual, penetapan DPT, Pendaftaran calon sampai pada masa kampanye tidak luput dari intervensi pasangan calon maupun partai politik pengusung untuk menjadikan momentum bertemu dengan masyarakat sebagai ajang kampanye. Distribusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun pasangan calon sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik dalam situasi daerah yang dalam masa pemulihan. Namun demikian, dengan mengatasnamakan rasa kemanusiaan pemberian bantuan ada saja yang menyalahgunakan, seperti pada saat bantuan diberikan dengan menyebutkan salah satu pasangan calon maupun memasang stiker pada bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

4.3.2 Isu Sektor Infrastruktur

Bencana yang telah berdampak pada kerusakan bangunan serta terhambatnya kegiatan masyarakat secara sosial, ekonomi dan kehidupan lainnya. Dampak dari kerusakan infrastruktur yang terjadi pada struktur sosial masyarakat karena tidak dapat fokus melakukan pemulihan secara ekonomi dan penghidupan mereka. Kerusakan fundamental pada infrastruktur sebagai penopang aktivitas warga masyarakat sangat mengganggu transisi kehidupan masyarakat yang membutuhkan perbaikan tingkat ekonomi pasca bencana yang terjadi. Banyak

fasilitas umum mengalami kerusakan membuat akses masyarakat menjadi tidak berjalan normal, seperti kerusakan jembatan, sumber air bersih, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Besarnya kerugian pada sektor bangunan fasilitas publik yang mengalami kerusakan bisa dihitung terhadap bertambahnya biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian, pembersihan longsor di jalan pembersihan puing bangunan, dan juga untuk perbaikan darurat meliputi jalan, jaringan pipa, sanitasi dan jaringan irigasi, serta potensi penurunan hasil produksi pertanian pada wilayah-wilayah yang terdampak bencana yang begitu hebat. Berdasarkan hasil perhitungan dari dampak kerugian yang disebabkan oleh infrastruktur sebesar Rp.303.676.794.062, serta fasilitas umum lainnya dengan kerugian mencapai Rp.15.943.406.000. Secara keseluruhan jumlah kerusakan serta kerugian mencapai sekitar Rp.319.620.200.062.

Sebagian besar kerugian dan Kerusakan pada bangunan publik adalah miliknya pemerintah daerah yang selama ini digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses identifikasi dan kalkulasi terkait dengan kerugian akibat bencana harus dilakukan secara serius oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan publik yang harus mendapatkan kepastian hukum dan asas keadilan dari kebijakan pemulihan.

Tabel 4.6

Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur

No	Sub Sektor	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian	Kepemilikan		Persentase
					Pemerintah	Swasta	
1	Transportasi Darat	Rp 201,343,206,000	Rp 19,760,000	Rp 201,362,966,000	Rp 201,362,966,000	-	63.00%
2	Transportasi Laut	Rp 48,000,000,000	Rp -	Rp 48,000,000,000	Rp 48,000,000,000	-	15.02%
3	Energi	Rp 18,302,284,900	Rp 3,240,000,000	Rp 21,542,284,900	Rp 21,542,284,900	-	6.74%
4	Sumber Daya Air	Rp 23,947,549,063	Rp 12,683,646,000	Rp 36,631,195,063	Rp 36,631,195,063	-	11.46%
5	Pos dan Telekomunikasi	Rp 1,200,000,000	Rp -	Rp 1,200,000,000	Rp 1,200,000,000	-	0.38%
6	Air Bersih dan Sanitasi	Rp 10,883,754,100	Rp -	Rp 10,883,754,100	Rp 10,883,754,100	-	3.41%
Total		Rp 303,676,794,062	Rp 15,943,406,000	Rp 319,620,200,062	Rp 319,620,200,062	-	100.00%

Sumber: (*Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi, Lombok Utara Tahun 2018-2019*).

Mengacu pada data diatas dapat di lihat bahwa transportasi merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup parah dengan kerusakan mencapai 63 persen, kerusakan jembatan Kabupaten mencapai panjang 117,6 dan jembatan nasional sepanjang 259,2 meter. Jalan provinsi juga mengalami kerusakan 0,625 KM, secara keseluruhan kerusakan tersebut pada jalan Kabupaten mencapai 8,6 KM yang mengalami kerusakan ringan 0,65 KM, kerusakan sedang mencapai 6,65 KM sedangkan untuk kerusakan berat mencapai, 1,3 KM. Kerusakan sektor infrastruktur tersebut tentunya sangat mengganggu aktivitas pemulihan daerah yang dalam kondisi masa perbaikan dari semua sektor.

4.3.3 Isu Sektor Ekonomi Produktif Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan jumlah aset sektor pertanian, UMKM atau Bumdes Milik Desa, aset fisik usaha menengah, sektor perkebunan, sektor perdagangan, pariwisata dan koperasi

serta berbagai sektor lainnya. Pemerintah telah melakukan inventarisir jumlah kerusakan serta estimasi kerugian yang diakibatkan dari bencana dengan tujuan dapat di usulkan kepada pemerintah pusat atau pembiayaan dari berbagai lembaga yang akan memberikan bantuan. Hal ini dilakukan untuk membangun kembali sektor ekonomi produktif masyarakat yang sudah hancur akibat bencana. Kalkulasi berbagai kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari bencana pada bagian ekonomi produktif masyarakat mencapai Rp. 703.029.793.839. Jumlah kerusakan pada sektor ekonomi produktif masyarakat pasca bencana tentunya berdampak terhadap kondisi sosial dan perekonomian yang serba sulit. Mata pencaharian masyarakat menjadi sulit karena dampak kerusakan dari bencana yang begitu sangat besar. Sehingga perlu dilakukan rekapitulasi kerusakan sektor ekonomi produktif guna memastikan kebutuhan pemulihan sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Kerusakan dan Kerugian ekonomi produktif yang memiliki pengaruh besar terhadap penurunan produksi, pendapatan serta pembiayaan untuk menyelesaikan residu bangunan yang rusak cukup besar memerlukan anggaran yang besar untuk melakukan pemulihan.

Tabel. 4.7

Perhitungan menilai Kerugian dan Kerusakan Ekonomi Produktif Masyarakat

No	Sub Sektor	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian	Persentase
1	Pertanian, Perternakan, Perkebunan	Rp 12,477,500,000	Rp 6,975,660,000	Rp 19,453,160,000	2.77%
2	Perikanan	Rp 148,392,000	Rp 2,410,000,000	Rp 2,558,392,000	0.36%
3	Perdagangan	Rp 22,903,500,000	Rp 8,500,000,000	Rp 31,403,500,000	4.47%
4	Koperasi	Rp 21,945,000,000	Rp 20,100,000,000	Rp 42,045,000,000	5.98%
5	Pariwisata	Rp 78,358,255,172	Rp 386,803,160,000	Rp 465,161,415,172	66.17%
6	UKM, UMKM, IKM, Warung, Kios, BUMDES	Rp 138,478,326,667	Rp 3,930,000,000	Rp 142,408,326,667	20.26%
Total		Rp 274,310,973,839	Rp 428,718,820,000	Rp 703,029,793,839	100.00%

Sumber: (Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi, Lombok Utara Tahun 2018-2019).

Dampak bencana 2018 mengakibatkan berbagai sektor mengalami kerusakan serta besarnya kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Sektor pariwisata yang menjadi salah satu unggulan daerah juga mengalami kerusakan parah, sehingga mengalami penurunan kunjungan wisatawan karena sarana dan prasarana rusak. Lumpuhnya sektor pariwisata berimplikasi terhadap usaha perdagangan UMKM dan UMK serta sirkulasi bisnis menjadi tidak berjalan. Selain itu, dampak berdampak terhadap kondisi nelayan yang tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan dikarenakan peralatan melaut mengalami kerusakan secara merata. Terjadinya multi player effect yang besar terhadap kerusakan pariwisata sangat berdampak pada kehidupan dan ekonomi masyarakat.

4.3.4 Isu Sektor Sosial Masyarakat

Selain sektor infrastruktur yang mengalami dampak, sektor sosial masyarakat juga terdampak dari bencana gempa bumi yang menimpa bumi tioq tata tunaq yang biasanya daerah Lombok Utara lebih di kenal oleh masyarakat Lombok khususnya. Sektor ini mencakup tiga bidang yaitu keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Kerusakan pada sektor kesehatan meliputi kelengkapan sarana prasarana, perumahan atau rumah dinas serta berbagai alat pendukung lainnya. Sektor agama mengalami kerusakan parah dimana tempat ibadah serta berbagai kelengkapannya mengalami kerusakan parah juga, seperti: Masjid, Wihara, Pura serta berbagai kelengkapannya. Sedangkan pada sektor pendidikan juga terdampak yang luar biasa dimana gedung belajar mengajar rusak berat, rumah dinas para guru, perpustakaan sebagai tempat mencari ilmu juga mengalami kerusakan tidak hanya bangunan tetapi buku-buku bacaan juga mengalami kerusakan.

Tabel. 4.8

Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial

No	Sub Sektor	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian	Persentase
1	Kesehatan	Rp 137,419,625,036	Rp 58,023,462,566	Rp 195,443,087,602	14.69%
2	Pendidikan	Rp 498,146,570,000	Rp 33,772,411,000	Rp 531,918,981,000	39.98%
3	Keagamaan	Rp 435,942,800,000	Rp 62,097,140,000	Rp 498,039,940,000	37.43%
4	Seni Budaya, Cagar Budaya	Rp 89,125,000,000	Rp 16,000,000,000	Rp 105,125,000,000	7.90%
Total		Rp 1,160,633,995,036	Rp 169,893,013,566	Rp 1,330,527,008,602	100.00%

Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kab. Lombok Utara Tahun 2018-2019

Kerusakan pada tiga sektor sosial tersebut sangat berdampak terhadap kondisi masyarakat yang hidup dalam keputusan karena akses semua kebutuhan sangat terbatas. Tidak dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan tenang karena fasilitas mengalami kerusakan, anak-anak tidak dapat belajar seperti biasanya karena gedung sekolah mengalami kerusakan, serta pelayanan bidang kesehatan tidak dapat maksimal dilakukan karena fasilitas pendukung kesehatan serta layanan mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan sektor sosial tersebut berdampak terhadap kondisi sosial kehidupan masyarakat yang menjadi terganggu, sektor kesehatan misalnya, dalam memberikan pertolongan dan pelayanan sudah barang tentu tidak dapat dilakukan secara optimal ditengah kondisi masyarakat yang membutuhkan.

4.3.5 Isu Kerusakan Lintas Sektor

Daya rusak bencana yang ditimbulkan tidak hanya pada satu sektor saja, melainkan menyentuh lintas sektoral mulai dari bangunan fisik, sosial, ekonomi,

budaya, agama dan sektor pemerintahan juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Selain itu, yang mengalami kerusakan yang sangat parah juga pada sektor keamanan dan ketertiban, serta perbankan yang mengalami kerusakan secara total. Berdasarkan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pihak yang pengelola aset di daerah bahwa kerugian sebesar Rp. 401.113.252.948. Kerusakan lintas sektor tentunya membutuhkan anggaran yang besar untuk masa pemulihan sehingga diperlukan perencanaan dan identifikasi yang menyeluruh guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Kerusakan lintas sektoral berdampak terhadap dimensi kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, misalnya kondisi perekonomian masyarakat dan produktivitas menjadi terganggu, dampak sosial dan kemanusiaan serta pelayanan publik menjadi tidak optimal. Semua sektor yang terdampak akibat bencana gempa bumi 2018 memiliki korelasi dengan sektor lainnya, sehingga perlu dilakukan rekapitulasi kerusakan dengan tujuan untuk mempermudah identifikasi kerugian. Identifikasi dilakukan dengan tujuan pemerintah daerah dapat membuat usulan kepada pihak-pihak terkait dengan kebutuhan masa pemulihan. Rincian kerusakan lintas sektoral yang terjadi di Lombok Utara:

Tabel 4.9

Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor

No	Sub Sektor	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian	Persentase
1	Pemerintahan	Rp 195,663,826,782	Rp 33,550,512,231	Rp 229,214,339,013	57.14%
2	Keamanan Ketertiban	Rp 22,215,737,258	Rp 1,032,360,589	Rp 23,248,097,847	5.80%
3	Lingkungan Hidup	Rp 11,738,214,210	Rp 31,355,000	Rp 11,769,569,210	2.93%
4	Perbankan	Rp 791,000,000	Rp 130,690,471,328	Rp 131,481,471,328	32.78%
5	Pengurangan Risiko Bencana	Rp 4,695,457,000	Rp 704,318,550	Rp 5,399,775,550	1.35%
Total		Rp 235,104,235,250	Rp 166,009,017,698	Rp 401,113,252,948	100.00%

Sumber: Rencana Aksi Rehab/Rekon, 2019.

Berbagai kerusakan bangunan pada pemerintahan baik itu Kantor pemerintahan Provinsi, Kabupaten sampai pada kantor Camat serta bangunan pemerintahan Desa mengalami kerusakan yang besar dan kerugian yang sangat besar apabila dilakukan proses pembangunan kembali. Dari hasil menghitung berbagai kerugian dan kerusakan yang diakibatkan bencana gempa 2018 dengan capaian sebesar Rp. 229.214.339.013. Total persentase kerugian mencapai 57,14% mengakibatkan seluruh aktivitas mengalami kendala termasuk layanan di semua sektor pemerintahan. Dengan besarnya kerusakan dan kerugian tentunya akan membutuhkan berbagai pihak untuk membangun kembali daerah Lombok Utara, diperlukan kolaborasi formal secara struktural dengan pemerintah pusat termasuk dengan pihak non pemerintah untuk bekerjasama melakukan masa pemulihan.

Dampak bencana yang terjadi berupa kerusakan bangunan seperti Kantor Polres, perumahan dinas Koramil beserta fasilitas pendukungnya serta sektor Perbankan yang mengalami kerugian sebesar Rp. 791.000.000, serta kerugian finansial sebesar Rp 130.690.471.328. Kerusakan sektor Ketertiban dan Perbankan ini tentunya berdampak pada aktivitas layanan kemanan dan kenyamanan warga masyarakat yang masih dalam situasi krisis. Dengan lumpuhnya pelayanan akan memberikan rasa ketakutan bagi warga masyarakat yang terus diikuti rasa trauma yang sangat mendalam. Selain itu, sirkulasi perekonomian masyarakat menjadi terhambat karena kerusakan fasilitas Bank yang di Lombok Utara membuat simpan pinjam dan transaksi lainnya mengalami kendala yang serius. Pemerintah dengan berbagai upaya melakukan proses pendataan dan verifikasi terkakit dengan jumlah kerusakan beserta kerugian dengan harapan bahwa kedua sektor vital penunjang kehidupan ini dapat dibangun dengan secepat mungkin.

4.3.6 Isu Kesejahteraan dan Jaminan Hidup

Pasangan petahana NADI memiliki rekam jejak dan personal karakteristik yang cukup baik, jika dilihat dari capaian kinerjanya selama menjabat sebagai kepala daerah maupun Sekretaris daerah. Sebagai salah satu daerah yang paling terakhir mendapatkan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Pada masa kepemimpinan H. Najmul Akhyar dan H. Suardi mendapatkan beberapa penghargaan danareksa atas kinerjanya dalam bidang pengelolaan keuangan dengan predikat terbaik, pemimpin terbaik dalam mendukung hubungan dan komunikasi dan merupakan terpopuler pada media daring tahun 2019 dari Humas Indonesia (Stigna, 2022). Prestasi yang di torehkan oleh kedua pasangan NADI,

merupakan modal sosial yang dapat memperkuat kekayaan elektoral mereka dalam kontestasi politik di Pilkada serentak 2020.

Prestasi dan kinerja yang baik tersebut tidak lantas memberikan pandangan positif kepada pemerintahan Pasangan petahana NADI oleh masyarakat pasalnya petahana dianggap tidak maksimal dalam proses penanganan isu bencana yang pada saat itu menjadi persoalan utama pasca terjadinya gempa bumi di Lombok Utara 2018-2020. Proses distribusi bantuan kesejahteraan dan jaminan hidup (JADUP) bagi korban bencana dinilai sangat lamban oleh masyarakat akibatnya menimbulkan stigma negatif kepada pemerintah.

Isu kesejahteraan dan bantuan sosial mengemuka di tengah masa transisi pemulihan pasca terjadinya bencana hebat yang melanda Kabupaten Lombok Utara 2018. Tumbangnya petahana pada perhelatan 2020 di Lombok Utara di indikasikan karena petahana tidak dapat membendung arus kritikan dari pihak lawan yang secara masif menjadikan penanganan bencana yang belum tuntas menjadi panggung politik untuk menghantam pasangan petahana.

Kondisi ini sesuai dengan penuturan, Suman Jayadi, selaku Ketua OKK dari Partai Golkar sekaligus menjabat menjadi Tim Pemenangan Partai Golongan Karya, wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025. Berikut petikan wawancaranya:

“Sesungguhnya rekam jejak Dr. H. Najmul Akhyar bagus dalam arti kata beliau menjadi salah satu calon yang mendapatkan dukungan kuat oleh partai politik maupun masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Hanya saja ada kelemahan yang secara struktur disebabkan oleh persoalan Peraturan Perundang-undangan tentang Wirausaha Baru. Kemudian masyarakat banyak menganggap H. Najmul Akhyar gagal dalam merealisasikan Visi dan Misi beliau, tetapi menurut saya tidak sepenuhnya mengalami kegagalan, contohnya program satu dokter satu desa, beliau sudah lakukan meskipun belum sepenuhnya terisi, sehingga jika dikalkulasi realisasi Visi dan Misinya 70%, namun demikian masyarakat beranggapan visi dan misinya pak Najmul Akhyar gagal karena terkunci pada isu-isu dalam penanganan gempa 2018 hal ini disebabkan karena tidak totalnya H. Najmul

Akhyar hadir ditengah-tengah masyarakat pasca bencana, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang tidak tahu bahwa KLU adalah daerah yang mendapatkan prestasi dalam penanganan bencana yang masuk dalam kategori tercepat di Indonesia.

Suhaeli relawan pasangan Najmul-Suardi, pada tanggal 13 Maret 20.

Berikut petikan wawancaranya:

Terkait dengan distribusi bantuan pembangunan dan bantuan sosial bagi masyarakat, saya rasa tidak ada kendala pada saat itu, yang namanya RTG itu program pusat bukan program daerah. Kita hanya menunggu tanpa berpangku tangan, malahan terlalu banyak bantuan RTG yang turun. Bahkan yang muda pun dapat bantuan RTG pada saat itu. Kalau kita berbicara kepuasan, yang namanya masyarakat tidak semuanya pasti akan puas, saya pribadi yang sukses saja. Tetapi masyarakat tentu semuanya itu tidak objektif, lebih-lebih yang tempat anda bertanya adalah lawan politiknya, pasti tidak sukses.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pasangan petahana sesungguhnya telah menunjukan kinerja yang cukup baik dalam jabatannya sebagai pemimpin daerah, baik itu yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi termasuk juga dalam penanganan bencana pasca gempa bumi tahun 2018 di Lombok Utara. Capaian realisasi bantuan RTG dan JADUP yang tidak terealisasi secara menyeluruh menjadi salah satu faktor utama menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan petahana yang memimpin pada suatu krisis. Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap petahana disebabkan oleh berbagai persoalan yang muncul dilapangan baik teknis maupun kebijakan dan kewenangan diluar kendali pemerintah daerah. Berikut dapat dilihat data penerima bantuan Rumah Tahan Gempa untuk jaminan hidup (JADUP) di Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan penyaluran per-Kecamatan:

Tabel. 1.10

Data Penerima Bantuan Jaminan Hidup (JADUP) tahun 2020 di KLU.

No	Sebaran Penerima Bantuan Jaminan Hidup Per-Kecamatan	Penerima Bantuan Jaminan Hidup (JADUP)
1	Kecamatan Bayan	600
2	Kecamatan Kayangan	520
3	Kecamatan Gangga	734
4	Kecamatan Tanjung	670
5	Kecamatan Pemenang	544
Data Usulan		3.068

Sumber: Fasilitator BPBD Lombok Utara Tahun 2020.

Merujuk pada data penerima bantuan sosial Jaminan Hidup (JADUP) di atas tentunya masih jauh dari harapan masyarakat yang hanya 3.6000 ribu penerima dari jumlah daftar pemilih tetap di Lombok utara pada tahun 2020 yaitu sebesar 172.326, dengan sebaran penerima bantuan di Kec. Bayan hanya 600 orang dari jumlah pemilih sebesar 36.855, Kec. Kayangan penerima hanya 520 dari jumlah pemilih sebesar 32.580, Kec. Gangga dengan penerima sebesar 735 dari 36.359 pemilih, Kec. Tanjung penerima bantuan sebesar 670 dari 38.727 pemilih, sedangkan penerima bantuan sosial jaminan hidup di Kec. Pemenang sebesar 544 dari total pemilih 27.805 pemilih. Artinya dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak belum mendapatkan bantuan tersebut tentunya menjadi kecewa dan punya stigma negatif kepada pemerintah daerah.

Realisasi penerima bantuan sosial berupa jaminan hidup (JADUP) bagi masyarakat terdampak alam gempa bumi, belum sepenuhnya terdistribusi dengan merata, hal ini kemudian menjadi perhatian masyarakat pasalnya proses penyaluran bantuan sosial jaminan hidup terkesan tebang pilih untuk masyarakat tertentu saja, padahal distribusi bantuan sosial hidup bagi masyarakat korban bencana gempa

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat. Namun demikian, bagi warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan terkesan pemerintah tidak berpihak kepada mereka.

4.3.7 Fasilitas Pendidikan dan Rumah Sakit

Isu krusial lainnya yang muncul pada saat 2018 di Lombok Utara Adalah normalisasi sekolah berkaitan dengan ruang kelas, misalnya kalau membutuhkan 1.700 tenda untuk pembuatan ruang kelas sementara. Melalui Kementerian Pendidikan RI pemerintah telah memberikan bantuan kepada para guru yang terdampak. Sebagai bentuk rasa peduli terhadap para guru yang menjadi korban gempa pemerintah juga memberikan bantuan dana Rp. 12 juta kepada setiap guru, tetapi demikian masih terdapat kekurangan yang menjadi kebutuhan, pendirian sekolah yang telah didirikan oleh relawan bukan dari pemerintah, sehingga Presiden Jokowi secara berulang memerintahkan kepada pihak terkait untuk membangun kembali sekolah-sekolah dengan cepat guna mendukung proses belajar-mengajar menjadi normal kembali. (Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Lombok Utara, 2021). Berikut penuturan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, terkait dengan kritikan Pemerintah mengenai penanganan Korban Gempa Lombok:

Beberapa permasalahan yang muncul pasca terjadinya bencana yaitu: (1) terkait dengan isu sektor pendidikan pasca masa pemulihan secara substansi terletak pada kelas-kelas darurat, sehingga Kementerian PUPR diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden untuk mempercepat proses pembangunan, namun pada 14 September 2018, kelas darurat itu masih dilakukan oleh relawan di mana kelas-kelas darurat hampir seluruhnya dikerjakan oleh relawan. Bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud juga belum secara menyeluruh, kondisi tersebut langsung disampaikan oleh bupati kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Fasilitas publik di sektor kesehatan juga menjadi persoalan, di mana masih kurangnya fasilitas pendukung kesehatan seperti rumah sakit sementara untuk para penyintas. Diharapkan rumah sakit segera dibangun meskipun dalam bentuk rumah

sakit sementara. Belum di bangunnya rumah sakit dan lapangan medis juga perlu dipercepat sehingga kondisi tersebut menjadi masalah tersendiri. Padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara telah menyiapkan terminal Tanjung untuk lokasi Pembangunan rumah sakit sementara.

Belum di bangunnya fasilitas publik seperti, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perkantoran tentunya berdampak terhadap kualitas layanan yang diberikan pemerintah baik pusat maupun daerah, sehingga diperlukan langkah konkrit untuk percepatan pembangunan pasca. Lambannya proses implementasi kebijakan dalam hal mencukupi kebutuhan masyarakat mengurus kepercayaan publik terhadap kemampuan dan kinerja pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap korban bencana yang terus mengalami kondisi yang memburuk. Distribusi bantuan dari pihak non pemerintah bagi masyarakat korban bencana semakin menambah kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan pada situasi krisis.

4.3.8 Kerusakan dan Kerugian Akibat Gempa Bumi

Bencana gempa yang meluluhlantahkan Lombok Utara menimbulkan daya rusak dan ledak yang sangat luar biasa bagi tatanan kehidupan masyarakat. Kerusakan dan kerugian yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh warga masyarakat menimbulkan berbagai persoalan baru. Kerusakan fisik bangunan yang tak terhitung menyebabkan pelayanan di semua sektor tidak dapat di jalankan secara normal. Kondisi perekonomian menjadi hancur karena berbagai aset dan properti warga hilang, sehingga secara otomatis warga menjadi miskin karena kehilangan harta benda. Aspek sosial masyarakat juga terdampak dari bencana, dimana berbagai fasilitas pendukung hancur serta hubungan sosial menjadi

terganggu karena keadaan yang sulit, konflik terjadi serta berbagai peristiwa lainnta mengikuti.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan masukan pemerintah daerah dan berbagai pihak membagi klaster terkait dengan perhitungan dalam menentukan tingkat kerusakan perumahan baik itu dari kerusakan berat, sedang ataupun kerusakan secara ringan sudah dilakukan oleh pelaksana teknis dilapangan. Pemerintah menentukan kriteria berdarakan proses yang sangat panjang melalui berbagai masukan dan verifikasi berlapis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun masih ditemukan berbagai persoalan secara teknis dilapangan tetapi pemerintah tetap melakukan evaluasi dan perbaikan. Selain dampak secara fisik terhadap kerusakan bangunan warga, kondisi ekonomi masyarakat juga terdampak serius, dimana pendapatan masyarakat menjadi tidak ada serta daya beli yang sangat rendah hanya mengandalkan uluran bantuan dari pemerintah dan pihak lainnya. Kerusakan sektor menjadi sub sektor yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah melakukan proses verifikasi. (Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun, 2019).

Tabel. 4.11

Sektor Penilaian Kerusakan dan Kerugian

No	Permukiman	Sektor Perhitungan Kerugian & Kerusakan
1	Permukiman	Kerusakan terjadi pada sub sektor perumahan dan berbagai Prasarana Lingkungan
2	Infrastruktur	Kerusakan pada berbagai alat transportasi baik itu darat, laut maupun udara, rusaknya sumber daya air dan Irigasi beserta pendukungnya, telekomunikasi dan penerangan listrik serta infrastruktur lainnya.

3	Ekonomi Produktif	Rusaknya berbagai potensi produktif warga seperti: lahan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan serta sektor UKM, IMKM, IKM, warung, kios, Badan Usaha Milik Desa.
4	Aspek Sosial	Rusaknya fasilitas Pendidikan, Keagamaan, Budaya, sektor dan Kesehatan.
5	Lintas Sektor	Lingkungan hidup, Ketertiban dan Keamanan serta sektor Bank atau Perbankan

Sumber: Rencana Aksi Rehab/Rekon 2018-2019

Kalkulasi dampak kerusakan dan berbagai macam kerugian akibat bencana harus mampu di potret dengan seksama oleh pemerintah dengan harapan tidak terjadi kesalahan dalam menentukan anggaran untuk membangun kembali daerah Lombok Utara. Pemerintah telah menggunakan berbagai metode dan perhitungan untuk menentukan estimasi kebutuhan untuk masa perbaikan kembali. Kerusakan 8 sektor yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya akan dapat di lakukan pendataan yang cermat jika betul-betul menggunakan metode yang relevan dengan kondisi daerah yang terdampak. Mayoritas kerusakan ada pada sektor permukiman warga yang mencapai 72,43% bila dibandingkan dengan sektor lainnya yang kerusakannya lebih sedikit, baik itu ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya. Proses verifikasi yang cermat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang benar-benar akurat sesuai dengan fakta lapangan. Begitu besarnya kerusakan sektor permukiman sehingga berdampak pada sektor-sektor lainnya.

Tabel. 1.12
Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian

No	Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (RP)	Total dan Kerugian (Rp)
1	Pemukiman	3,505,485,200,000	3,731,409,800,000	7,236,895,000,000
2	Infrastruktur	303,676,794,062	15,943,406,000	319,620,200,062

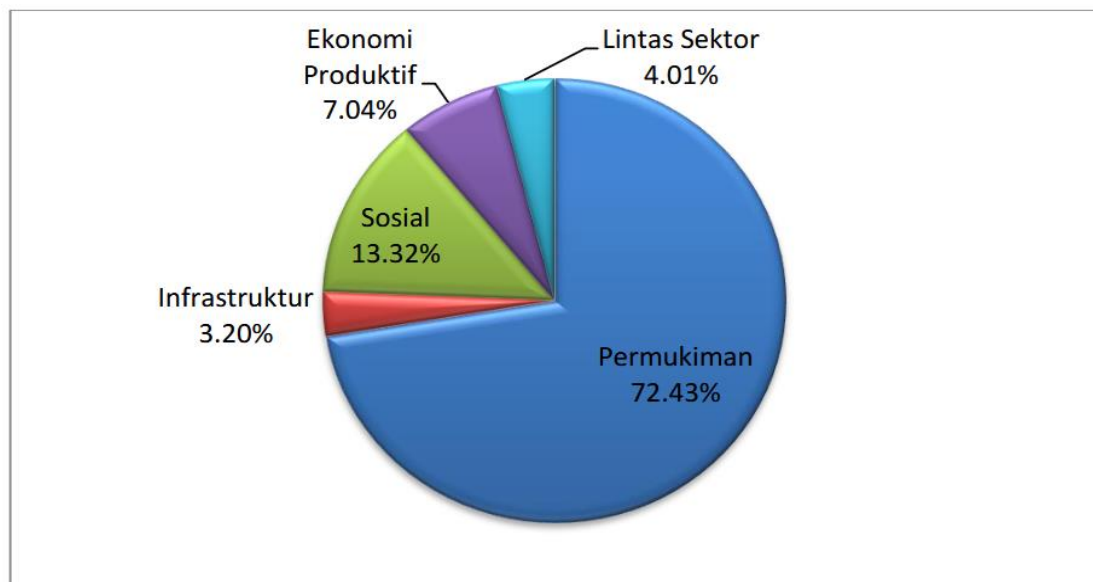
3	Sosial	1,160,633,995,036	169,893,013,566	1,330,527,008,602
4	Ekonomi	274,310,973,839	428,718,820,000	703,029,793,839
5	Lintas Sektor	235,104,235,250	166,009,017,698	401,113,252,948
Total		5,479,211,198,187	4,511,974,057,264	9,991,185,255,451

Sumber: *Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Lombok Utara Tahun, 2018.*

Data kerusakan yang diakibatkan gempa bumi pada tahun 2018 jika dipresentasikan sangat besar, seperti kerusakan sektor permukiman yang mencapai 72.43 persen atau kerusakan yang persentasenya paling parah. Sektor sosial dengan kerusakan mencapai persentase sebesar 13.32 persen, sektor ekonomi produktif mencapai 7.04 %, sektor infrastruktur mengalami kerusakan mencapai 3.20%, sedangkan 4.01 persen pada sektor lintas lainnya.

Gambar. 4.7

Diagram Kerusakan dan Kerugian Gempa Bumi Lombok Utara, 2018



Sumber: *(Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi, Lombok Utara Tahun 2018-2019).*

Data di atas menunjukan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi pada tahun 2018 secara fisik dan finansial sangat begitu besar. Oleh karena itu proses Pembangunan kembali membutuhkan dana dan waktu yang memadai untuk masa pemulihan pasca bencana. Pemerintah pusat termasuk juga pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memulihkan daerah pasca bencana. Dalam PP 21 menyebutkan bahwa pihak yang menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan adalah pemerintah pusat dan daerah sebab pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan penanggulangan mulai dari sebelum , saat tanggap darurat sampai pada masa pemulihan (Bakti dan Nurmandi.2020). Data hasil verifikasi merupakan pedoman pemerintah dalam mengambil keputusan setelah melalui proses yang panjang dalam menentukan perhitungan kerusakan dan kerugian. Pemerintah telah menentukan berbagai kategori kerusakan dalam menentukan status perumahan warga masyarakat yang terdampak, baik itu berat, sedang sampai pada kategori ringan dengan jumlah bantuan yang bervariasi tergantung pada jenis kerusakan.

4.3 Konversi Isu Kebijakan Ke Politik Elektoral Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara 2020

Pilkada 2020 di Lombok Utara berlangsung selama fase transisi pemulihan pasca-gempa. Delapan isu kritis muncul dari proses pemulihan: rekonstruksi pemukiman, rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi produktif, restorasi sektor sosial, kerusakan lintas sektor, rekonstruksi fasilitas pendidikan, rekonstruksi rumah sakit, dan bantuan sosial untuk keamanan mata pencaharian (Alcano, 2024). Di antara isu tersebut, dua isu menjadi sangat menonjol dalam

kontes pemilu: rekonstruksi perumahan tahan gempa (Rumah Tahan Gempa, selanjutnya disebut RTG) dan distribusi bantuan sosial untuk keamanan mata pencaharian (Petrova, 2024), dan (Adegoke, 2023).

Isu RTG muncul sebagai isu kampanye dominan karena sangat terlihat dan secara luas dianggap tertunda. Peserta wawancara secara konsisten melaporkan bahwa proses verifikasi tidak sesuai dengan kondisi lapangan, beberapa kontraktor meninggalkan proyek sebelum selesai, dan distribusi bantuan tidak merata di seluruh desa. Kesenjangan pelaksanaan ini menciptakan cadangan frustrasi publik yang dimobilisasi kampanye penantang secara efektif. Seperti yang dijelaskan seorang relawan kampanye, pemilih tidak membutuhkan argumen politik yang canggih; mereka dapat melihat dengan mata kepala sendiri rumah mana yang telah dibangun kembali dan mana yang belum (Bendor, 2024), dan (Bertram, 2024).. Bukti material rekonstruksi yang belum lengkap menjadi argumen paling kuat melawan petahana (Bareto, 2023). Penduduk secara konsisten menekankan bahwa keterlambatan dalam rekonstruksi RTG memengaruhi evaluasi kinerja pemerintah mereka. Seorang penduduk menjelaskan:

"Bantuan RTG tidak memenuhi harapan publik. Banyak warga mengeluh karena tidak semua orang menerima bantuan, dan proses pemulihan tidak tepat waktu maupun terarah dengan baik." (Ria, penduduk Distrik Bayan, wawancara, 9 Januari 2025).

Peserta lain juga mencatat:

"Rekonstruksi terus berlanjut, tetapi masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Banyak penduduk belum menerima RTG atau bantuan mata pencaharian, sehingga isu-isu ini berpengaruh selama pemilihan." (Dian Agung Adi Putra, wawancara, 28 Desember 2024).

Isu penting kedua, bantuan sosial untuk jaminan mata pencaharian, sangat terkait dengan yang pertama. Rumah tangga yang rumahnya belum dibangun

kembali tetap bergantung pada dukungan transisi, dan setiap gangguan dalam dukungan tersebut memperkuat persepsi tentang kelalaian pemerintah. Petahana berargumen bahwa tanggung jawab atas laju rekonstruksi terutama berada pada pemerintah pusat, yang mengendalikan sebagian besar pendanaan. Penantang menanggapi bahwa pemerintah lokal gagal secara efektif mengadvokasi Lombok Utara di tingkat pusat dan tidak menggunakan diskresi terbatas yang tersedia untuk mempercepat hasil yang terlihat. Kerangka ini mengalihkan kesalahan dari otoritas pusat yang jauh ke pejabat lokal yang terlihat, yang merupakan dinamika yang diprediksi oleh teori retrospeksi yang bijaksana (Petrova, 2024) dan (Pries A.A, 2023).

Politisasi bencana dalam konteks ini bukan sekadar *oportunistik*. Hal ini mencerminkan kesenjangan akuntabilitas yang nyata di mana pembagian tanggung jawab formal antar tingkat pemerintahan tidak sesuai dengan pengalaman hidup warga yang terdampak (Okunola, 2025). Dinamika serupa telah diamati di lingkungan multi-level lainnya. Nohrstedt dan rekan-rekannya mencatat bahwa bencana dapat menjadi fokus pembelajaran kebijakan, tetapi hanya ketika saluran kelembagaan menerjemahkan pelajaran menjadi reformasi (Bertram, 2024, (Nohrstedt, 2024), dan (Lodi, 2023). Di Lombok Utara, ketiadaan saluran seperti itu selama masa kampanye berarti pelajaran dari pemulihan diungkapkan bukan melalui reformasi kebijakan tetapi melalui hukuman elektoral. Pola ini sejalan dengan temuan dari Kota Meksiko, di mana penerapan kebijakan pemulihan menjadi variabel penting yang menghubungkan kerusakan gempa bumi dengan pangsa suara petahana (Alvarez, 2024).

Penanganan bencana pasca terjadinya gempa bumi tahun 2018 di Lombok Utara mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah melalui kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana gempa bumi berdampak terhadap semua sendi kehidupan sosial masyarakat, infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan sektor lainnya. Masa transisi pemilihan telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah mulai dari distribusi bantuan untuk kebutuhan logistik dan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Kendati demikian, implementasi kebijakan penanganan pasca bencana dianggap belum optimal dan merata oleh berbagai pihak terutama warga masyarakat yang belum tersentuh secara optimal. Pada masa transisi pemulihan berbagai persoalan ditemukan di lapangan, seperti: (1) verifikasi yang tidak berjalan sesuai fakta di lapangan, (2) terdapat oknum aplikator yang tidak menyelesaikan pembangunan rumah warga, (3) distribusi bantuan tidak merata.

Munawir Aziz (2014), menggambarkan bahwa mendekati tahun politik, segala macam peristiwa dapat menjadi panggung untuk kehadiran manuver-manuver politik. Bencana yang terjadi justru menjadi ajang kampanye bagi politikus untuk menaikkan bendera partai dan media pengenalan calon anggota legislatif (caleg) baik pada tingkatan DPR, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota. Momentum bencana dapat menjadi jurus untuk menghantam kerja kreatif yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Bencana yang terjadi di tahun politik, akan menjadi bencana lanjutan jika terjadi politisasi bencana. Menjadikan bencana alam sebagai panggung politik merupakan ironi di tengah kontestasi untuk merebut dan mempertahankan kuasa. (<https://www.ipmafa.ac.id/tragedi-politisasi-bencana/>).

Belum optimalnya penanganan bencana secara merata di konversi sebagai sebuah kegagalan oleh para kandidat penantang. Isu sentral yang menjadi komoditas politik para kandidat pada Pilkada KLU 2020 adalah pembangunan RTG (Rumah Tahan Gempa). Distribusi bantuan dari pemerintah pusat ke daerah banyak mengalami kendala menjadi salah satu penyebab gagalnya pasangan NADI pada Pilkada KLU. Desakan terhadap percepatan pembangunan RTG ditegah masyarakat yang serba kekurangan menjadi kemarahan publik yang tidak dapat terbendung. Keterlambatan penyelesaian bantuan RTG dan lambatanya proses pencairan dana pembangunan serta bantuan jaminan hidup bagi korban gempa.

Kegagalan penanganan bencana menjadi isu utama perdebatan para kandidat saling mengkritik terkait dengan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap proses penanganan bencana. Argumentasi para kandidat terkait dengan penyelesaian masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi serta jaminan hidup bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat bukan sepenuhnya daerah. Namun demikian, publik tetap menjadikan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses penanganan bencana di Lombok Utara. Perdebatan dalam dimensi kegagalan vs keberhasilan dalam penanganan bencana terus berlangsung secara masif tidak hanya pada level bawah namun juga pada level debat secara terbuka dengan menyajikan data oleh masing-masing kandidat. Kegagalan kebijakan penanganan bencana dikonversi menjadi wacana politik elektoral para kandidat guna mendapatkan dukungan publik.

Konversi isu bencana menjadi isu elektoral berlangsung melalui tiga mekanisme yang saling terkait. Mekanisme pertama adalah membingkai kesenjangan pelaksanaan sebagai kegagalan petahana. Kampanye penantang secara

sistematis menyajikan distribusi bantuan yang tidak merata, rekonstruksi RTG yang tidak lengkap, dan penyaluran dana pemulihan yang lambat sebagai bukti bahwa petahana gagal memerintah secara efektif. Kerangka ini efektif karena menghubungkan keluhan kebijakan abstrak dengan hasil konkret dan terlihat yang dapat diverifikasi pemilih dengan berjalan melalui lingkungan mereka sendiri. Materialitas bukti membuat pembingkai sulit dibales oleh petahana dengan argumen teknis tentang prosedur pemerintah pusat (Molder, A.L., A. Calcie, M.N, 2023).

Mekanisme kedua adalah *atributif* tanggung jawab. Petahana berargumen bahwa pemerintah pusat mengendalikan sebagian besar pendanaan pemulihan dan oleh karena itu memikul tanggung jawab utama atas keterlambatan. Penantang berpendapat bahwa pemerintah lokal adalah wajah negara di komunitas terdampak dan tidak dapat bersembunyi di balik prosedur pemerintah pusat. Pemilih sebagian besar mendukung kerangka penantang. Hasil ini konsisten dengan literatur yang lebih luas tentang atribusi kesalahan, yang menunjukkan bahwa pemilih cenderung memegang tingkat pemerintahan yang paling terlihat bertanggung jawab atas hasil yang mereka alami secara langsung (Morvan, 2024)Fokumuto, 2024). Hal ini juga konsisten dengan bukti bahwa sinyal kinerja pemerintah memiliki efek independen dan bertahan lama terhadap kepuasan warga, terlepas dari kompleksitas prosedural di balik sinyal tersebut (W.,Kim, T.K, 2024).

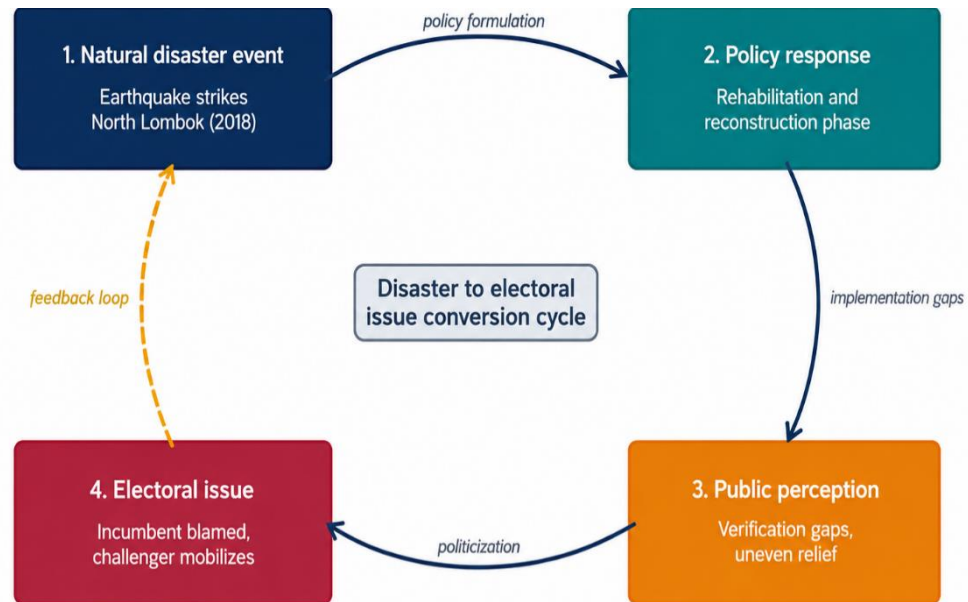
Mekanisme ketiga adalah debat terbuka tentang keberhasilan dan kegagalan. Kampanye ini menampilkan debat publik di mana setiap kandidat menyajikan data kemajuan rekonstruksi dan memperdebatkan interpretasi yang lain. Debat-debat ini tidak menyelesaikan pertanyaan faktual; mereka memperkuatnya. Dengan

memaksa pemilih memilih antara narasi yang bersaing, debat tersebut mengkristalkan bencana sebagai isu utama pemilihan. Dinamika ini selaras dengan temuan bahwa bencana dapat mengubah struktur pentingnya persaingan elektoral dengan mengangkat domain kebijakan tertentu di atas yang lain (Birch, 2023), dan (A.Schilpzand, 2023) Di Lombok Utara, bencana tersebut mengangkat perumahan dan bantuan sosial di atas agenda pembangunan yang lebih luas yang sebelumnya mendominasi politik lokal.

Gambar 4.7 menyajikan model konseptual siklus konversi. Siklus dimulai dengan peristiwa bencana alam, yang memicu respons kebijakan dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesenjangan implementasi dalam respons kebijakan membentuk persepsi publik, yang kemudian diubah menjadi isu elektoral melalui tiga mekanisme yang dijelaskan di atas. Umpan balik dari hasil pemilihan kembali ke peristiwa bencana mencerminkan fakta bahwa hasil pemilu mengubah insentif politik untuk tata kelola bencana di masa depan, menciptakan dinamika yang bergantung pada jalur di mana kualitas pemulihan memengaruhi kualitas kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya.

Gambar. 4.7

Siklus konversi dari peristiwa bencana alam ke isu elektoral. Sumber: model konseptual yang dikembangkan oleh penulis berdasarkan temuan lapangan.



Siklus konversi membantu menjelaskan mengapa petahana di Lombok Utara tidak mampu mengubah bencana menjadi keuntungan elektoral meskipun sumber daya pemerintah pusat yang besar dialokasikan untuk pemulihan. Literatur retrospeksi yang matang menunjukkan bahwa petahana yang memberikan bantuan nyata mendapatkan pangsa suara (Fokumuto, 2024), dan (A Schilpzand). Namun di Lombok Utara, visibilitas rekonstruksi yang belum selesai lebih besar daripada visibilitas sumber daya yang dialokasikan. Pemegang tetap tidak dapat mengklaim kredit atas rumah yang belum dibangun kembali, sementara penantang dapat secara kredibel menyalahkan ketidakhadirannya. Asimetri dalam klaim kredit dan atribusi

kesalahan ini merupakan fitur struktural pemulihan bencana di sistem multi-level dan layak dipelajari lebih lanjut.

Disertasi ini juga membawa implikasi bagi hipotesis partisan, kasus di Lombok Utara menunjukkan bahwa jaringan partisan petahana awalnya cukup kuat untuk menyerap sebagian frustrasi publik. Namun, seiring berjalannya kampanye dan bukti nyata rekonstruksi yang belum lengkap menumpuk, bahkan konstituen yang setia mulai membelot. Pola ini sejalan dengan temuan Birch di Honduras bahwa bencana parah dan meluas dapat membebani jaringan klienalis dan membuatnya tidak efektif (Birch S., Coma, F.M.i). Ini juga menggemakan pengamatan bahwa persepsi negatif terhadap manajemen krisis dapat mengikis kepercayaan politik bahkan di antara pendukung pemerintah (Aassve, A., Capezzone, dkk, 2024). Kekuatan partisan petahana tidak mampu membendung arus pergeseran isu kegagalan penanganan bencana yang terus mengalami fragmentasi pada level akar rumput.

Kasus Lombok Utara dengan demikian menunjukkan bahwa filter partisan kuat tetapi tidak tak terbatas; ketika kondisi material memburuk melewati ambang batas, loyalitas partisan digantikan oleh penilaian retrospeksi diubah menjadi isu elektoral dalam konteks demokrasi muda. Secara praktis, temuan ini menyoroti pentingnya tata kelola pasca-bencana yang transparan, tepat waktu, dan adil untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas demokratis. Penelitian mendatang mungkin akan meneliti proses serupa di wilayah lain yang terdampak bencana menggunakan pendekatan komparatif atau metode campuran.

4.4 Transformasi Isu Bencana Menjadi Isu Kebijakan: Pergeseran Makna dan Implikasinya Terhadap Ruang Kontestasi Politik Elektoral

Kontestasi politik cenderung mengalami dinamika yang begitu cepat termasuk terhadap faktor yang menyebabkan kekalahan petahana pada kontestasi sebuah pemilihan. Kekalahan petahana pada perhelatan Pilkada cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat prediktif, di antaranya, citra diri petahana yang dianggap tidak menarik, perubahan perilaku dari pemilih, program kerja yang tidak terealisasi sesuai dengan yang tertuang di dalam visi dan misi pada saat kampanye, munculnya konflik internal partai yang berimplikasi terhadap pecahnya dukungan partai pendukung, munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dari petahana pada saat memimpin di daerah.

Namun kondisi tersebut, berbeda dengan Pelaksanaan pada masa transisi pemulihan pasca terjadinya bencana alam, situasi krisis dapat menjadikan sebagai arena kontestasi kekuasaan antar pasangan calon yang bertarung pada setiap tahapan. Pelaksanaan masa pemulihan sangat potensial dijadikan ruang oleh para kandidat pada kampanye guna mendapatkan simpati publik. Tahapan mulai dari verifikasi faktual, penetapan DPT, Pendaftaran calon sampai pada masa kampanye tidak luput dari intervensi pasangan calon maupun partai politik pengusung untuk menjadikan momentum bertemu dengan masyarakat sebagai ajang kampanye. Tahapan demi tahapan selalu menjadi momentum para kandidat untuk memberikan pengaruhnya kepada publik dengan menjadikan isu bencana sebagai jalan masuk untuk saling memperkuat posisi politik masing-masing.

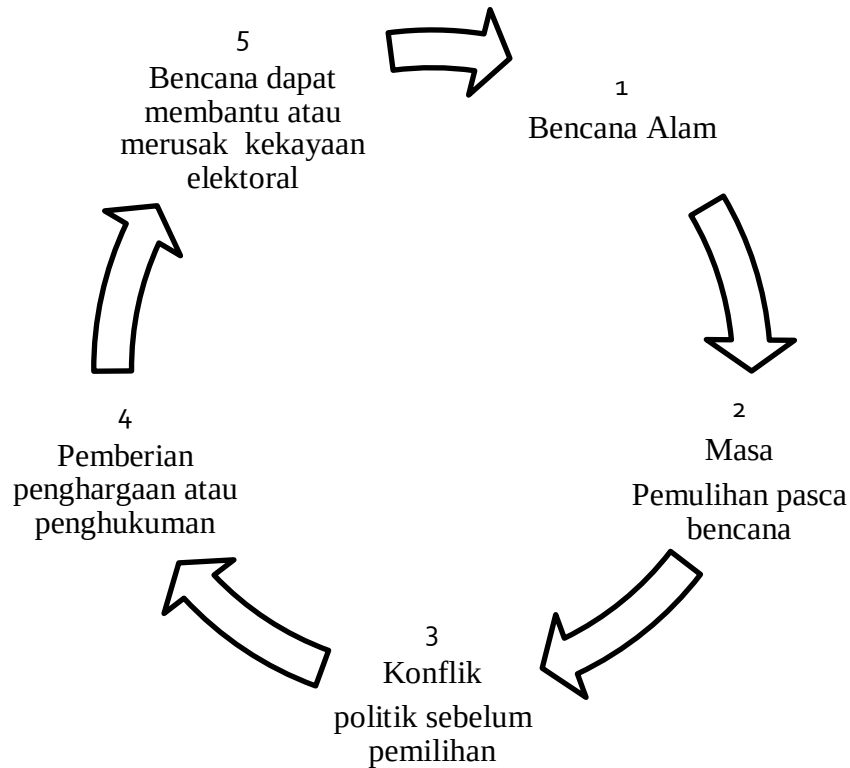
Pertarungan politik dalam membangun citra diri para kandidat sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan calon, jika dalam penglihatan para

pemilih bahwa kandidat memiliki keberpihakan kepada mereka maka itu menjadi bagian penilaian yang positif kepada calon, namun jika penilaiannya negatif terhadap calon maka dapat memberikan hukuman dengan cara tidak memilih mereka pada saat pemilihan. Kondisi bencana dapat memberikan manfaat maupun batu sandungan terhadap para kandidat dalam membangun citra diri ditegah krisis bencana. Oleh karena itu, momentum bencana dapat dilihat sebagai sebuah peristiwa politik non prediktif tetapi memiliki pengaruh besar untuk memperkuat atau memperlemah dukungan politik para kandidat terutama petahana yang memiliki keunggulan dominasi kewenangan dan kekuasaan.

Kandidat petahana akan menggunakan posisi sebagai pihak yang dapat melakukan mobilisasi kekuatan dengan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan meningkatkan elektabilitas petahana. Sebaliknya, kandidat penantang akan melakukan manuver dan serangan politik terhadap kinerja pemerintah yang belum di nilai tidak berhasil dalam melakukan penanganan bencana baik itu secara kebijakan maupun teknis operasionalnya. Dengan demikian, siklus pada tahapan pemilihan menentukan perjalanan masing-masing kandidat untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada publik. Berikut dapat dilihat siklus politisasi bencana pada Pilkada di Lombok Utara.

Gambar. 4.8

Siklus Politisasi Bencana Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2020



Sumber: Hasil Olahan Penelitian, 2025.

Siklus di atas menjelaskan bahwa politisasi bencana tidak dapat berdiri tunggal namun berdasarkan proses dari beberapa hal yang saling berkaitan satu sama lain. Bencana alam gempa bumi di Lombok Utara pada tahun 2018 merupakan sebuah peristiwa alami yang mengakibatkan daya rusak yang sangat luar biasa baik secara fisik, material, dan menelan korban yang banyak. Kondisi tersebut membutuhkan masa transisi pemulihan yang panjang dengan kompleksitas persoalan yang beragam, mulai dari distribusi bantuan yang tidak merata kepada korban-korban yang berada di wilayah pelosok-pelosok karena akses menuju lokasi sangat sulit. Selain itu, proses masa pemulihan beririsan dengan tahapan 2020,

semakin menambah pekerjaan pemerintah daerah menjadi lebih berat. Timbul konflik di tengah-tengah masyarakat terkait dengan distribusi bantuan kepada masyarakat korban bencana alam secara tidak merata menjadikan tahapan penanganan gempa terkesan politis.

Contoh kasus pada pembagian bantuan sosial ke lokasi pengungsian, masyarakat mengharapkan siapa saja datang untuk memberikan bantuan, baik itu sembako, pakaian, dan lain sebagainya. Hal ini dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk membangun citra diri di tengah situasi krisis untuk memberikan bantuan sosial atas dasar kemanusiaan kepada masyarakat. Karena di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal dan di sisi lain kesempatan ini diambil oleh Pasangan Calon untuk membangun citra dengan berbagai cara sebagai media kampanye.

Berdasarkan hasil penuturan dari Ardianto, salah satu Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Lombok Utara, wawancara Tanjung tanggal 21 Desember 2019, pada dokumen pada dokumen napak tilas penanggulangan bencana gempa bumi Lombok Utara “Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2021). Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Di kalangan legislatif Lombok Utara telah mengambil langkah-langkah cepat menyingkapi keadaan yang terpuruk yaitu koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Seperti upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pihak legislatif selaku representatif rakyat dan juga korban gempa. Adapun upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan gempa di Lombok Utara tahun 2018. Tiga hal penting yang perlu dipahami terkait kejadian gempa bumi 2018, yaitu ada, pemerintah dan masyarakat. Ketiga hal ini belum dipahami oleh berbagai pihak dalam konteks bencana sehingga terjadi kepanikan pada semua masyarakat”.

Menurut Ardianto, titik persoalan gempa bumi 2018 adalah tidak siapnya semua pihak sehingga kesiapan yang tidak beraturan dan terkesan morat-marit. Salah satu contoh adalah daerah sudah menyiapkan dana BDT waktu itu sebesar 1,5 milyar yang nyaris tidak terpakai. Hal ini disebabkan karena kepanikan pemerintah. Di samping banyaknya bantuan baik dari NGO maupun pemerintah sehingga ini tidak terpakai. Sesungguhnya hal tersebut suatu kekeliruan, seharusnya dana tersebut digunakan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada korban gempa yang bisa di pakai pada saat pasca tanggap darurat, karena dana itu memang disiapkan untuk penanganan bencana.

Alasan dana BTD tidak terpakai untuk membantu korban gempa, padahal kenyataannya korban gempa sangat membutuhkan. Tidak digunakannya dana BDT itu menjadi pertanyaan semua pihak, ketika itu masih menjadi anggota DPRD Lombok Utara. Menurutny, alasan pemerintah tidak menggunakan dana BDT saat itu karena banyaknya bantuan dari NGO. Suatu kekeliruan besar karena kedatangan NGO setelah 2 hari setelah gempa masa golden hour. Seharusnya belum ada bantuan dari NGO dana tersebut bisa dipakai karena pada saat itu yang dibutuhkan oleh korban adalah terpal dan makanan. Faktanya, dua pekan setelah gempa barulah masyarakat mendapatkan terpal. Dana BDT itu harusnya terpakai tanpa harus terlebih dahulu memikirkan aturan UU dan mekanisme lantaran aturannya mengikuti situasi yang terjadi, pasalnya, saat itu masyarakat berada pada situasi tanggap .

Persoalan lain yang dihadapi oleh pemerintah juga berkaitan dengan ketidakpastian menghadapi situasi banyak bantuan-bantuan dari NGO yang tidak sampai kepada korban alias tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena pola dan mekanisme penyaluran bantuan banyak yang tidak merata, karena tidak ada kesiapan data yang akurat. Berdasarkan hasil penuturan Ardianto, salah satu Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Lombok Utara, wawancara Tanjung tanggal 21 Desember 2019, pada dokumen napak tilas penanggulangan bencana gempa bumi Lombok Utara “Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2021).

“Ada dua hal penyebab pola penyaluran bantuan tidak merata. Pertama, pendataan terhadap korban tidak tepat dan kemungkinan juga karena kepanikan. Kedua, sejumlah kalangan menilai bahwa adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk mementingkan diri sendiri sehingga arah dari donasi dana Rp. 6 Miliar, terkesan tidak tepat sasaran. Kalau dirunut secara detail sebetulnya masih banyak persoalan yang berkaitan dengan penanganan korban gempa 2018, tetapi menjadi ranah pihak-pihak yang punya kewenangan. Selaku anggota DPRD KLU, hal-hal yang dilakukan untuk mendorong pemerintah dalam menangani situasi dan korban gempa adalah secara intensif melakukan komunikasi dan pertemuan dengan pemerintah di kontainer guna mendampingi pemerintah untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya segera dilakukan. Kemudian mendampingi pemerintah mendata jumlah korban dengan menurunkan tim khusus untuk melakukan pendataan. Melalui komisi terkait pihaknya meminta data korban serta berapa donasi yang masuk. Namun saat itu semua yang diharapkan tidak jelas, sehingga dirinya berinisiatif untuk turun sidak ke BPBD untuk mencari data riil. Pihak DPRD baru tahu ada dana Rp. 6 Miliar yang masuk. Pada saat pihaknya melakukan sidak dana yang masih ada tinggal 2 miliar. Pada saat itu pula pihaknya mendapatkan penjelasan dari BPBD terkait alokasi dana tersebut. Namun demikian, kendala yang dialami DPRD saat itu adalah kesulitan bertemu dan berkomunikasi karena sama-sama korban gempa.

Kontestasi politik di KLU terlihat dengan terang bahwa pasangan calon memanfaatkan penanganan isu bencana sebagai senjata terkuat yang disampaikan untuk mempengaruhi masyarakat. Isu terkait dengan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan Jaminan Hidup (JADUP) menjadi modal utama untuk saling menghantam pada situasi pada saat itu. Bagaimanapun kami petahana menangkis serangan terkait isu RTG dan JADUP dengan menyajikan data, pengaruh masyarakat yang belum mendapatkan lebih ganas meskipun jumlahnya lebih sedikit”. Distribusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun pasangan calon sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik dalam situasi daerah yang dalam masa pemulihan. Namun demikian, dengan mengatasnamakan rasa kemanusiaan pemberian bantuan ada saja yang menyalahgunakan, seperti pada saat bantuan

diberikan dengan menyebutkan salah satu pasangan calon maupun memasang stiker pada bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Kendati dalam proses masa darurat pemerintah daerah dinilai cukup mampu untuk melakukan penanganan bagi korban , mulai dari distribusi bantuan sampai pada pendataan jumlah kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi 2018. Namun demikian, Berdasarkan hasil penuturan Bupati, Najmul Akhyar, pada dokumen pada dokumen napak tilas penanggulangan bencana gempa bumi Lombok Utara “Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, 2021).

“Kondisi yang dialami Kabupaten Lombok Utara, pertama, normalisasi sekolah, kalau dikoreksi ruang kelas misalnya KLU membutuhkan 1700 tenda, Pemerintah Daerah Lombok Utara bersyukur lantaran bulan ketiga sejak kejadian gempa menerpa KLU, Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan telah hadir untuk memberikan bantuan kepada para guru yang ada di daerah. Dimana bantuan tersebut berupa uang tunai Rp. 12.000.000 kepada setiap guru-guru. Selain pemberian bantuan kepada guru, pemerintah pusat juga menginstruksikan kepada pihak terkait untuk segera mungkin melakukan pembangunan sekolah-sekolah, karena yang saat ini ada baru sekolah darurat yang dibangun oleh relawan-relawan non pemerintah”.

Selain bantuan rumah tahan gempa (RTG), persoalan yang belum dapat direalisasikan dengan cepat oleh pemerintah yaitu pencairan bantuan dana sosial bagi korban bencana yaitu JADUP yang tak kunjung didapatkan oleh masyarakat. Hal tersebut tentunya semakin menambah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh terhadap proses realisasi bantuan jaminan hidup tersebut.

Berdasarkan penjelasan Najmul Akhyar pada Antara News.com, bahwa Pemerintah melalui Kementerian Sosial menjelaskan bahwa untuk JADUP belum bisa di cairkan oleh pemerintah kepada warga Kabupaten Lombok Utara, Nusa

Tenggara Barat yang menjadi korban bencana, karena status masa tanggap darurat belum selesai, sehingga dengan demikian proses pencairan belum bisa dilaksanakan.

“ Keseluruhan perumahan yang mengalami kerusakan akibat bencana selama masa tanggap darurat hingga akhir 2019 jumlahnya mendekati sebanyak 42 ribu unit rumah. Sehingga sisanya sebanyak 35 ribu unit harus dibangun selama perpanjangan status masa tanggap darurat hingga Maret 2020. Meskipun demikian pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terutama berkaitan dengan data-data warga terdampak gempa bumi yang berhak memperoleh jaminan hidup. Terkait dengan jaminan hidup, semua data sudah diserahkan ke Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan, kalau menurut apa yang disampaikan Menteri Sosial, jaminan hidup pasti akan cair karena itu janji pemerintah, kalau semisalnya tidak keluar, berarti pemerintah pusat menyalahi janjinya”. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial bahwa dana jaminan hidup belum dapat dikeluarkan pada masa tanggap darurat belum selesai, sekarang tinggal memilih kalau selesaikan tanggap darurat macet pembangunan rumah tahan gempa. Kalau mau cepat keluar, selesaikan tanggap darurat, tetapi mana yang harus diprioritaskan, apakah jaminan hidup atau saudara kita yang belum punya rumah, kalau dari sisi bantuan pemerintah, tentu yang harus diutamakan adalah pembangunan rumah tahan gempa. Sebab, kalau proses pembangunannya di stop gara-gara menginginkan jaminan hidup, maka sebanyak 35 ribu unit rumah rusak tidak mendapatkan bantuan dana perbaikan”. “

Data dari redaksi DS, 24 September 2019, bahwa realisasi tahap awal untuk bantuan diserahkan yang diperuntukan untuk masyarakat di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 4.297 unit. Tahapan kemajuan masa pemulihan untuk pembangunan kembali perumahan yang mengalami kerusakan yang terus diawasi oleh pemerintah melalui daerah dan para aparat TNI. Hal ini dilakukan untuk untuk mendorong proses percepatan pembangunan rumah warga yang secara teknis harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasangan petahana NADI memiliki rekam jejak personal karakteristik yang cukup baik jika dilihat dari capaian kinerjanya selama menjabat sebagai kepala daerah maupun Sekretaris Daerah di Lombok Utara. Pada masa kepemimpinan H.

Najmul Akhyar dan H. Suardi mendapatkan beberapa penghargaan Dana reksa atas kinerjanya dalam bidang pengelolaan keuangan dengan predikat terbaik dan merupakan terpopuler pada media daring tahun 2019 dari Humas Indonesia pada prestasinya lainnya (Stigna.2022).

Namun demikian, prestasi tersebut tidak lantas memberikan pandangan positif kepada pemerintahan Pasangan petahana NADI oleh masyarakat pasalnya petahana dianggap tidak maksimal dalam proses penanganan isu bencana yang pada saat itu menjadi persoalan utama pasca terjadinya gempa bumi di Lombok Utara 2018-2020. Proses penanganan Bantuan RTG dan JADUP dinilai sangat lamban oleh masyarakat akibatnya menimbulkan isu-isu tidak berjalanya visi dan misi dari pemerintah pada saat itu. Kondisi ini sama dengan yang disampaikan oleh Masdiyanto yang merupakan salah warga masyarakat Dusun Gol Desa Medana Kec. Tanjung, pada 30 Januari 2025:

“Kalau cepat ya cepat, tapi ribet, berbahaya, banyak masalahnya, membuat Masyarakat keseringan berkelahi, apalagi masalah tepat, kadang yang seharusnya tidak dapat menjadi dapat, yang seharusnya rusak ringan menjadi rusak berat, malah yang rusak berat berubah menjadi rusak ringan. Iya , dengan kemampuannya yang saya bilang tadi itu masih tetap tidak berhasil, banyak yang kurang, RTG ada yang belum dapat, Jadup ada yang dapat ada yang tidak.

Senada dengan yang disampaikan oleh M. Habi Bullah, salah satu warga masyarakat Desa Akar-akar Kec. Bayan, Rabu 8 Januari, 2025:

Terkait dengan distribusi bantuan RTG, menurut saya, ada yang sesuai ada juga yang tidak sesuai. Karena sebagian terdistribusi dan sebagian yang tidak terdistribusi bantuan tersebut ke masyarakat. Namun jika dilihat dari jumlah lebih banyak yang belum terdistribusi dengan merata dilapangan. Kompetensi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan gempa sudah bagus namun terkendala kekurangan personil dilapangan, sedangkan kalau dilihat dari efektivitas penanganan bencana gempa 2018, belum efektif, masih banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

Penuturan serupa juga di sampaikan oleh Wahyuni, seorang warga masyarakat

Desa Samaguna Kec. Tanjung Kamis 9 Januari, 2025:

Dalam pendistribusian bantuan pembangunan perumahan tahan gempa kepada masyarakat belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kebijakan yang belum mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat terutama dari proses tahapan yang dilakukan dari perencanaan sampai pada pengawasan belum maksimal dan dirasa masih keliru. Permasalahan ini masih banyak yang belum jadi 100% bahkan sasaran belum sesuai dengan penerima yang sebenarnya, ini mungkin diakibatkan adanya pihak ketiga yang mengelola sehingga dijadikan bisnis. Tidak efektif, karena kinerja/kesiapan pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini belum konsisten karena terjadi kekeliruan dari proses tahapan yang dilakukan dari kebijakan saat itu. Kekalahan Najmul-Suardi pada saat itu disebabkan karena isu bencana, terutama persoalan perumahan, ini merupakan permasalahan atau isu yang diangkat sebagai senjata politik lawannya pada saat itu. Dimanapun kampanye selalu membahas capaian pemerintah terkait dengan RTG dan JADUP.

Penuturan dari warga masyarakat Desa Sambik Bnagkol, Dito Saputra, wawancara

pada tanggal, 8 Desember 2024. Berikut petikan hasil wawancaranya:

Kalau menurut saya salah satu faktor yang menyebabkan petahana mengalami kekalahan pada Pilkada 2020 lalu adalah mungkin yang menjadi salah satu alasan karena sempat adanya kasus dilaporkannya orang yang mengkritik ketidakhadiran beliau ketika masa-masa gempa itu.

Tumbangnya petahana pada perhelatan 2020 di Lombok Utara, disebabkan oleh rusaknya kekayaan elektoral petahana pada situasi krisis pasca terjadinya bencana alam. Ketidakmampuan dalam membendung arus kritikan dari pihak lawan yang secara masif menjadikan penanganan bencana yang belum tuntas menjadi panggung politik untuk menghantam pasangan petahana. Hal ini senada dengan statment yang disampaikan oleh Suman Jayadi, M.Si selaku Ketua OKK dari Partai

Golkar sekaligus menjabat menjadi Tim Pemenangan Partai Golongan Karya, berikut petikan wawancara:

“Sesungguhnya rekam jejak Dr. H. Najmul Akhyar bagus dalam arti kata beliau menjadi salah satu calon yang mendapatkan dukungan kuat oleh partai politik maupun masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Hanya saja ada kelemahan yang secara struktur disebabkan oleh persoalan Peraturan tentang Wirausaha Baru. Kemudian masyarakat banyak menganggap H. Najmul Akhyar gagal dalam merealisasikan Visi dan Misi beliau, tetapi menurut saya tidak sepenuhnya mengalami kegagalan, contohnya program satu dokter satu desa, beliau sudah lakukan meskipun belum sepenuhnya terisi, sehingga jika dikalkulasi realisasi Visi dan Misinya 70%, namun demikian masyarakat beranggapan visi dan misinya pak Najmul Akhyar gagal karena terkunci pada isu-isu dalam penanganan gempa 2018 hal ini disebabkan karena tidak totalnya H. Najmul Akhyar hadir ditengah-tengah masyarakat pasca bencana , ditambah lagi banyaknya masyarakat yang tidak tahu bahwa Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang proses penanganan masa pemulihan paling cepat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pasangan petahana sesungguhnya telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam jabatannya sebagai pemimpin daerah, baik itu yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi termasuk juga dalam penanganan bencana pasca 2018 di Lombok Utara. Capaian realisasi bantuan RTG dan JADUP yang tidak terealisasi secara menyeluruh menjadi salah satu faktor utama menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan petahana yang memimpin pada suatu krisis.

Data realisasi penerima bantuan RTG dan JADUP pada tahun 2020 di Lombok Utara, Kec. Bayan Penerima Bantuan Korban RTG sebanyak 14.200 ribu dan untuk bantuan jaminan hidup atau HIDUP hanya 600 penerima di tahap awal. Kecamatan. Kayangan penerima bantuan RTG sebanyak 9.000 ribu untuk bantuan JADUP sebanyak 520 keluarga, Kecamatan. Gangga penerima RTG sebanyak 10.300 dan penerima JADUP sebanyak 734, Kecamatan, Tanjung penerima RTG

sebanyak 10.700 unit, dan penerima JADUP sebanyak 544 kepala keluarga, sedangkan untuk Kecamatan. Pemenang jumlah penerima bantuan RTG sebanyak 6.000 unit paling sedikit bila dibandingkan dengan kec. lainnya sedangkan untuk Bantuan Sosial Jaminan Hidup (JADUP) Kec. Pemenang hanya mendapatkan 544 KK. Jika dilihat progres dalam realisasi RTG dan JADUP di setiap kecamatan belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat artinya belum maksimal. Kondisi ini tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan bencana (Fasilitator BPBD Kabupaten Lombok Utara, 2020).

Kegagalan pertahanan dalam mempertahankan kekuasaannya pada perhelatan Pilkada tahun 2020 sudah diprediksi oleh beberapa pihak termasuk salah satunya yang meyakini bahwa NADI akan mengalami kekalahan pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Direktur M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto mengatakan pada Media [.gatra.com](http://gatra.com):

“ Kekalahan petahana NADI dapat diprediksi dari bebrapa analisa di antaranya: bahwa ferforma Petahana Najmul yang menunjukkan kinerja yang jalan di tempat. Selain itu 3 hal pokok yang akan menumbangkan petahana, pertama, perihal masa pemulihan bencana yang banyak mengalami persoalan baik teknis maupun regulasi, kedua, kedekatan Petahana dengan para para pejabat yang menjabat pada lingkungan pemerintahan daerah Lombok Utara menciptakan pesepsi buruk pada petahana dan ketiga, jabatan Najmul sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), membuat petahana membagi konsentrasi secara tanggung jawab ditenggang kekecewaan publik terhadap proses penanganan bencana yang belum tuntas semakin meningkat.

Masa transisi pemulihan pasca gempa bumi di Lombok Utara 2018, digunakan oleh para kandidat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, baik itu oleh penantang maupun oleh petahana sama-sama menjadikan masa pemulihan

sebagai media untuk mendapatkan dukungan politik. Kontestasi politik selalu identik dengan peluang petahana dalam memenangkan pertarungan, hal ini sangat mendasar dan rasional karena petahana memiliki daya dukung politik yang lebih bila dibandingkan dengan pasangan calon penantang. Kekuatan sumber daya dalam bentuk, finansial, dukungan partai politik pemenang pemilu, menguasai mesin birokrasi, serta memiliki kewenangan dan kekuatan politik yang kuat disinyalir tidak mampu membendung tekanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penanganan pasca gempa 2018 dianggap belum mampu menjawab pertanyaan publik. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pasangan JODA (Djohan-Dany) pada setiap kampanye, sebagai isu yang utama dan strategi melawan pasangan NADI.